RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG

TAHUN 2017-2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2017-2021 telah selesai disusun.

Renstra PD ini kami harapkan dapat mendorong transparansi dan meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bontang ***"Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".***

Kami menyadari bahwa Renstra PD ini masih jauh dari harapan kita, untuk itu tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan Renstra PD ini di masa yang akan datang.

Demikian Renstra PD ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan kepemerintahan yang baik ***(Good Governance)*** yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Bontang, Januari 2017

Kepala Dinas,

Drs. H. Abdu Safa Muha
NIP. 196707141994121004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah masing-masing wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Sedangkan untuk Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis PD masing-masing.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis PD dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Tahapan yang dilaksanakan mencakup :

1. Faktor-faktor penentu keberhasilan;
2. Penetapan-penetapan Tujuan dan Sasaran;
3. Penetapan Rencana Strategis yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan;

Demikian Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi dan peranan organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD 10

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 10

2.2. Sumber Daya PD 17

2.4. Kinerja Pelayanan PD 19

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD 32

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 34

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 34

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 35

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat) 38

3.4. Telaah Tata Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 48

3.5. Penentuan isu-isu strategis 49

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 50

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD 50

4.2. Strategi dan Kebijakan PD 53

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 53

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 55

6.1. Program dan Kegiatan PD 111

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 61

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra)Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2017 - 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2017 - 2021 dengan RPJMD Kota Bontang, Renstra Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur, dan dengan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontangdiuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontangmengacu pada tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontangsesuai dengan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakatdan memperhatikan Renstra Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlidungan Anak, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bontang.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang

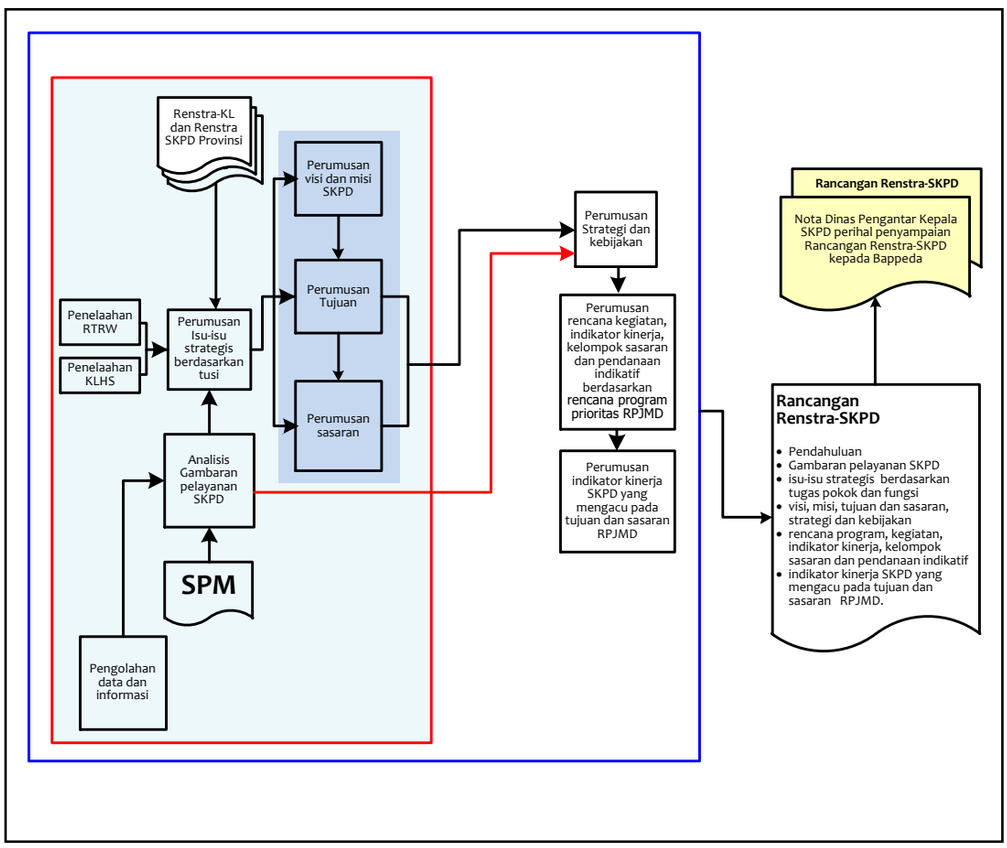

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 - 2021 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 - 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 - 2021 yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 - 2021 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 - 2021, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 – 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RenstraDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
20. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
24. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
39. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
41. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
42. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
47. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas SosialPemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra)Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 - 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangyaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Bontang.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangdalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian/lembaga, Telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat

daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BONTANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat. Susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan :
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
    1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
    2) Seksi Perlindungan Sosial;
    3) Seksi Jaminan Sosial;
d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
    1) Seksi Kelembagaan Sosial;
    2) Seksi Penanganan Fakir Miskin;
    3) Seksi Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial;
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
    1) Seksi Perlindungan Perempuan, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
    2) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

3) Seksi Sistem Data Gender dan Anak;

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:

1) Seksi Pemberdayaan dan Teknologi Tepat Guna;

2) Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;

Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang adalah sebagai berikut:

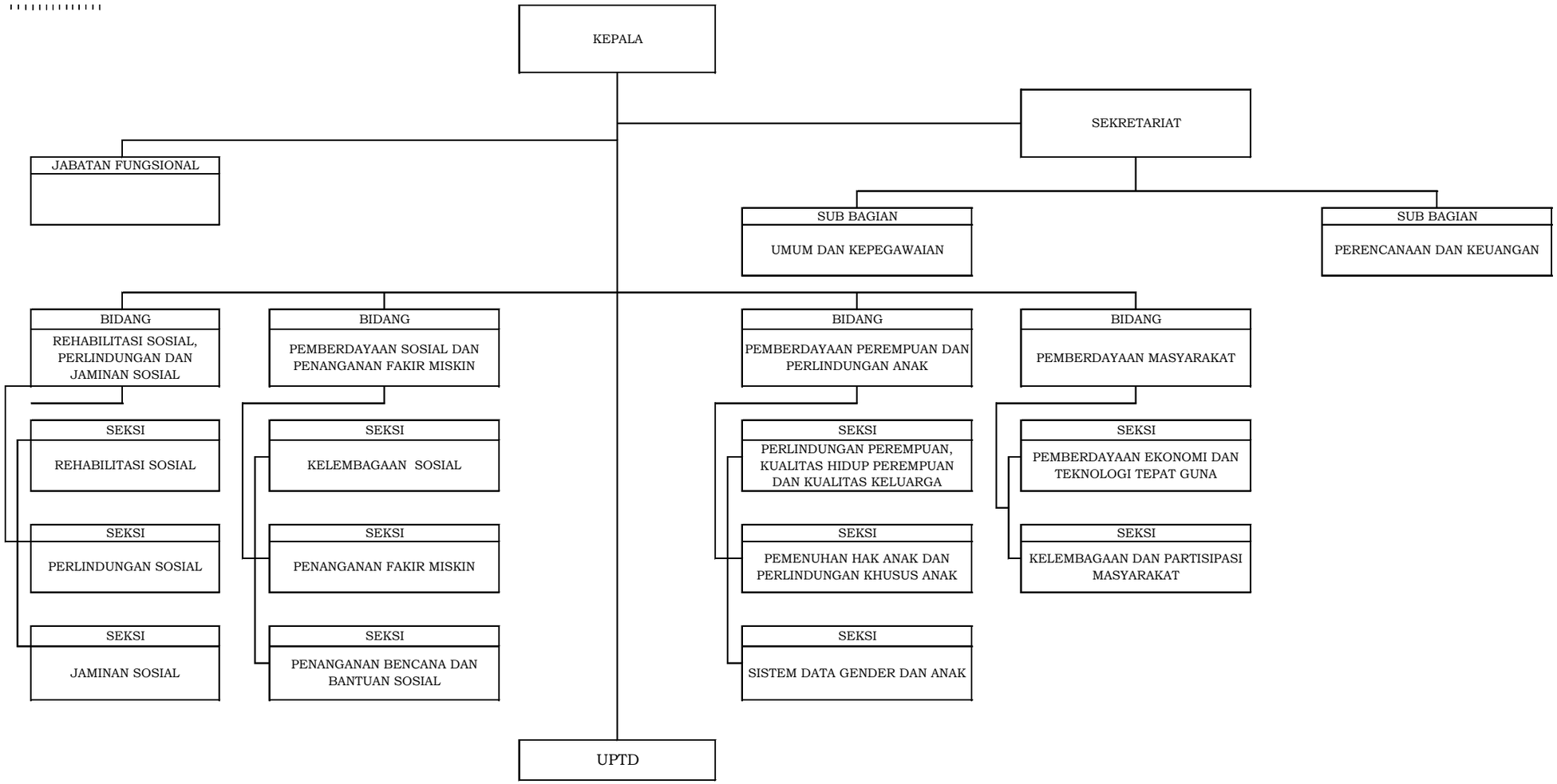
KEPALA
SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIDANG
REHABILITASI SOSIAL, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI
REHABILITASI SOSIAL
SEKSI
KELEMBAGAAN SOSIAL
SEKSI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN, KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA
SEKSI
PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
SEKSI
PERLINDUNGAN SOSIAL
SEKSI
PENANGANAN FAKIR MISKIN
SEKSI
PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
SEKSI
KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
SEKSI
JAMINAN SOSIAL
SEKSI
PENANGANAN BENCANA DAN BANTUAN SOSIAL
SEKSI
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
UPTD

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang sesuai dengan Peraturan DaerahNomor 2 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perengkat Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakatmelaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Sosial.
b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 46 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakatsebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan, dalam:

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat
2. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

6. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
7. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
8. Pelaksanaan tugas lain-lain

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas, dalam:

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan PD
3. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan
4. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan
5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
6. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
7. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian
8. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
9. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
10. Pelaksanaan tugas lain-lain

c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rehabilitasi Sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dalam :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan

2. Pembinaan, pengarahan, pengoordinasian, pengendalian urusan pelayanan dan rehabilitasi sosial WTS, WARIA, ODHA, BWBLP, eks Napza
3. Pembinaan, pengarahan, pengoordinasian, pengendalian urusan pelayanan dan rehabilitasi sosial ODK dan ADK
4. Pembinaan, pengarahan, pengoordinasian, pengendalian urusan pelayanan dan rehabilitasi sosial perempuan korban tindak kekerasan, anak korban tindak kekerasan dan AMPK
5. Pembinaan, pengarahan, pengoordinasian, pengendalian urusan pelayanan dan rehabilitasi sosial balita terlantar dan anak terlantar
6. Pembinaan, pengarahan, pengoordinasian, pengendalian penyelenggaraan urusan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial
7. Pembinaan, pengarahan, pengoordinasian, pengendalian penyelenggaraan urusan perlindungan dan jaminan sosial bagi seseorang, keluarga dan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dalam keadaan tidak stabil atau rentan dan/atau klinis
8. Pembinaan, pengarahan, pengoordinasian, pengendalian penyelenggaraan urusan perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar
9. Pembinaan,pengarahan, pengoordinasian, pengendalian penyelenggaraan urusan perlindungan sosial bagi gelandangan dan pengemis
10. Pembinaan, pengarahan, pengoordinasian, pengendalian penyelenggaraan urusan perlindungan sosial bagi anak jalanan dan Anak Berhadapan dengan Hukum
11. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
12. Pelaksanaan tugas lain-lain

d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin,dalam:

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;

2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penanganan fakir miskin;
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan kelembagaan sosial;
4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan korban bencana alam dan korban bencana sosial;
5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan bantuan sosial;
6. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
7. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
8. Pelaksanaan tugas lain-lain;

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam:

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlindungan perempuan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan sistem data gender dan anak
5. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
6. Pelaksanaan tugas lain-lain.

f. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kepala bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, dalam:

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan

2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat
4. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
5. Pelaksanaan Tugas Lain-lain.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber Daya Manusia (Pegawai) berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang dengan total jumlah pegawai sebanyak 73 orang diuraikan dalam Tabel 2.2.1 berikut ini:

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas SosialPemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMA Sederajat	4	4	14	8	30
3	D3	1	1	1	0	3
4	S1	10	15	4	5	34
5	S2	4	1	0	0	5
6	S3	0	0	0	0	0

Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari lulusan SMP Sederajat sebanyak 1 orang laki – laki dari Non PNS, lulusan SMA Sederajat sebanyak 30 orang yang terdiri dari 4 orang laki – laki dan 4 orang perempuan dari PNS, dan 14 orang laki – laki dan 8 orang perempuan dari Non PNS, lulusan D3 sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang laki – laki dan 1 orang perempuan dari PNS, dan 1 orang laki – laki dari Non PNS, lulusan S1 sebanyak 34 orang terdiri dari 10 orang laki – laki dan 15 orang perempuan dari PNS, dan 4 orang laki – laki dan 5 orang perempuan dari Non PNS, lulusan S2 sebanyak 5 orang terdiri dari 4 orang laki – laki dan 1 orang perempuan dari PNS.

Sumber Daya Manusia (Pegawai) berdasarkan golongan di perangkat daerahDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Bontang terdiri dari Golongan II sebanyak 4 orang laki – laki dan dan 4 orang perempuan, Golongan III sebanyak 12 orang laki – laki dan 13 orang perempuan, Golongan IV sebanyak 3 orang laki – laki dan 4 orang perempuanyang ditampilkan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	4	4	8
2	Golongan III	12	13	25
3	Golongan IV	3	4	7

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang ditampilkan dalam Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan MasyarakatKota Bontang

Nomor	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
	TANAH	1	2.577.106.416,00
	MESIN DAN PERALATAN	1.006	5.727.177.629
1	Alat-alat Besar	0	-
2	Alat-alat Angkutan	35	2.453.837.895
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0	-
4	Alat-alat Pertanian/ Perternakan	0	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	899	3.029.076.770,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	72	244.262.964,00
7	Alat-alat Kedokteran	0	-
8	Alat-alat Laboratorium	0	-
9	Alat-alat keamanan	0	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	3	2.741.087.946,00
10	Bangunan Gedung	3	2.741.087.946,00
11	Bangunan Monumen	0	-
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	-

12	Jalan dan Jembatan	0	-
13	Bangunan Air/ Irigasi	0	-
14	Instalasi	0	-
15	Jaringan	0	-
	ASET TETAP LAINNYA	8	74.994.500,00
16	Buku Perpustakaan	5	2.459.500,00
17	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	3	72.535.000,00
18	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	-
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	-
JUMLAH		**1.018**	**11.120.366.491,00**

Sarana dan prasarana di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang tersebut dalam kondisi baik.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

Pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangdapat diuraikan sebagai berikut.

1. Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pencapaian rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dapat dilihat dari indikator utama, yaitu Prosentase Penanganan PMKS.Capaian

tersebut setiap tahunnya melewati angka target Renstra:

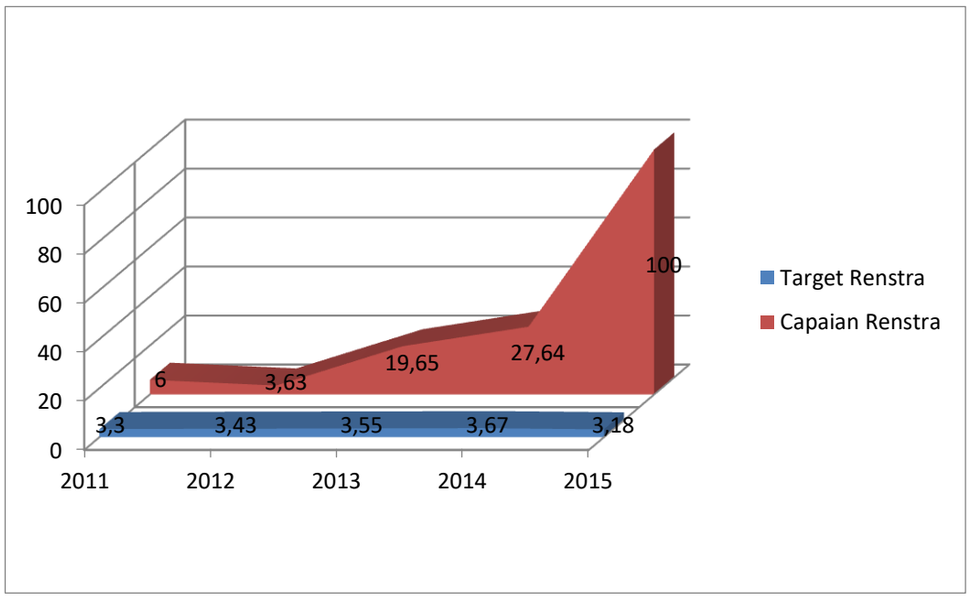

Gambar 1.1 Grafik Persandingan Target dengan Capaian Renstra PMKS yang memperoleh bantuan Tahun 2011 - 2016

Sumber : RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 – 2021

2. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, penanggulangan kemiskinan, keluarga rentan,serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

Pencapaian Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dapat dilihat dari indikator utama yaitusarana sosial seperti panti asuhan dalam hal ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti jompo/panti rehabilitasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

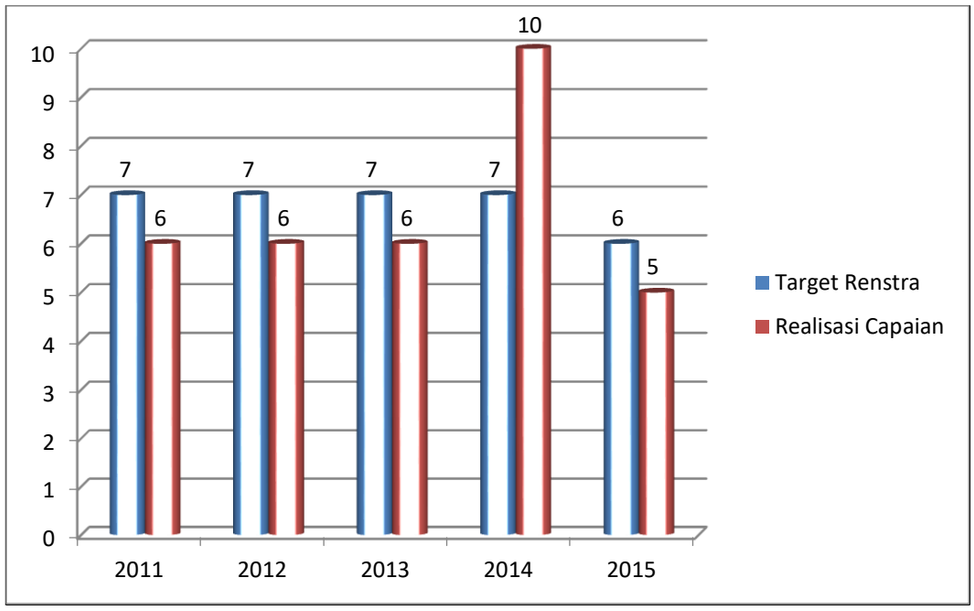

Gambar 2.1Grafik Persandingan Target dengan Capaian RenstraSarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti RehabilitasiTahun 2011 – 2016

Sumber : RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021

Dari gambar di atas untuk pencapaian pada tahun 2011 – 2013 tidak dapat mencapai target disebabkan pendataan panti yang tidak valid. Begitu juga pada tahun 2014, melebihi target disebakan oleh kesalahan dalam pendataan. Untuk tahun 2015 sudah sesuai data yang riil dengan keadaan. Walaupun angkanya tidak mencapai target.

Sedangkan untuk penanganan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dilihat pada gambar berikut ini :

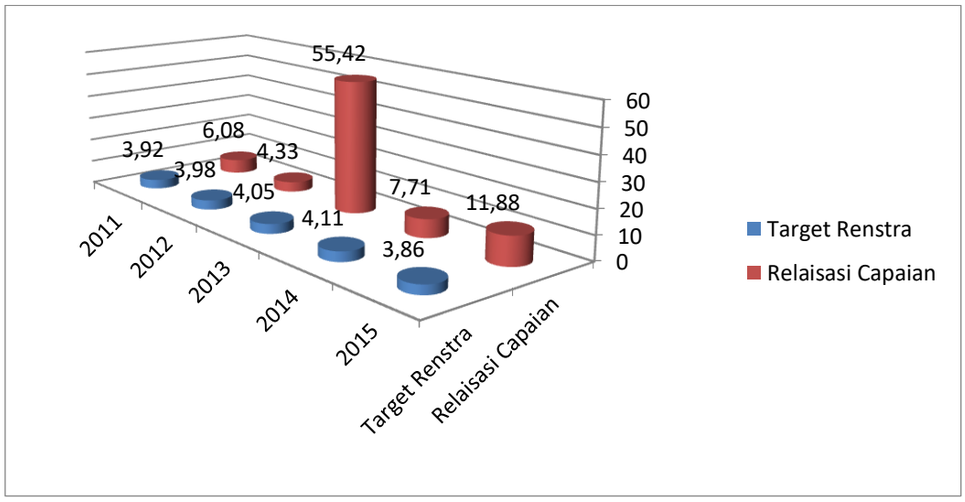

Gambar 2.2 Grafik Persandingan Target dengan Capaian RenstraSarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti RehabilitasiTahun 2011 – 2015

Sumber : RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 – 2021

Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kota Bontang menunjukan lebih tinggi, dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu dan menurun di Tahun 2015 :

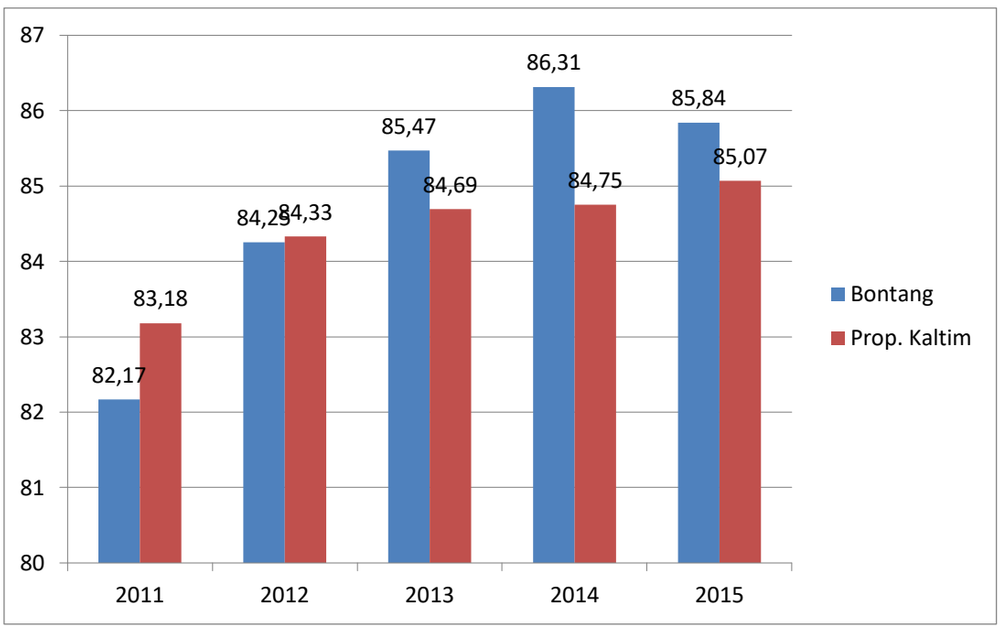

Gambar 3.1 Grafik Persandingan capaian IPG Kota Bontangdengan IPG Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Dilihat capaian IPG Provinsi Kalimantan Timur menunjukan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kota Balikpapan merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Paser capaian IPGnya rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

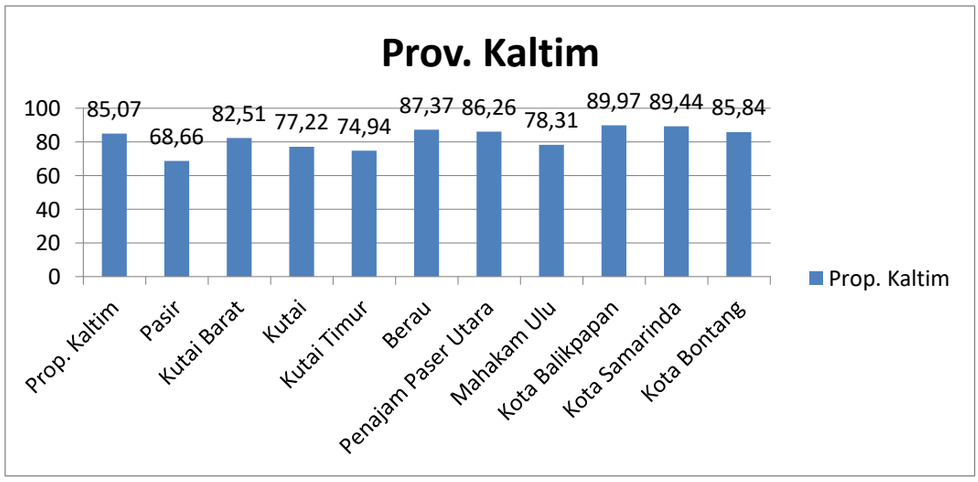

Gambar 3.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Kalimantan Timur dengan IPG Provinsi

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kota Bontang pada tingkat provinsi kurang baik, berada dibawah rata-rata provinsi dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat di tahun 2015, bahkan menurun dari tahun 2011. Penurunan ini antara lain akibat semakin terbatasnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dlihat pada grafik berikut :

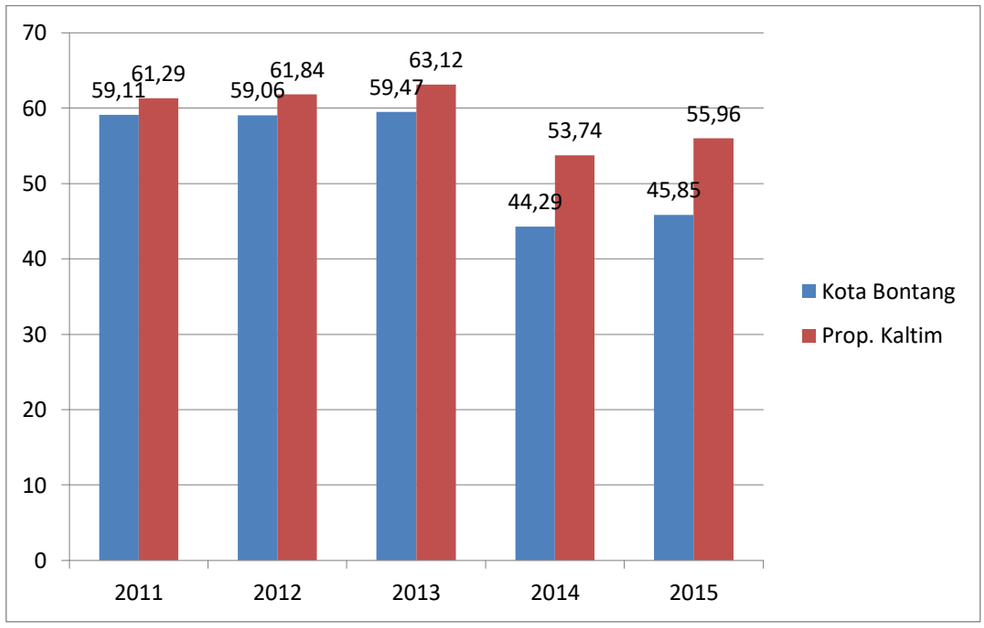

Gambar 3.3. IDG Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Bontang 2011-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur memiliki angka dbawah 60, bahkan Kota Bontang hanya 45,85. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

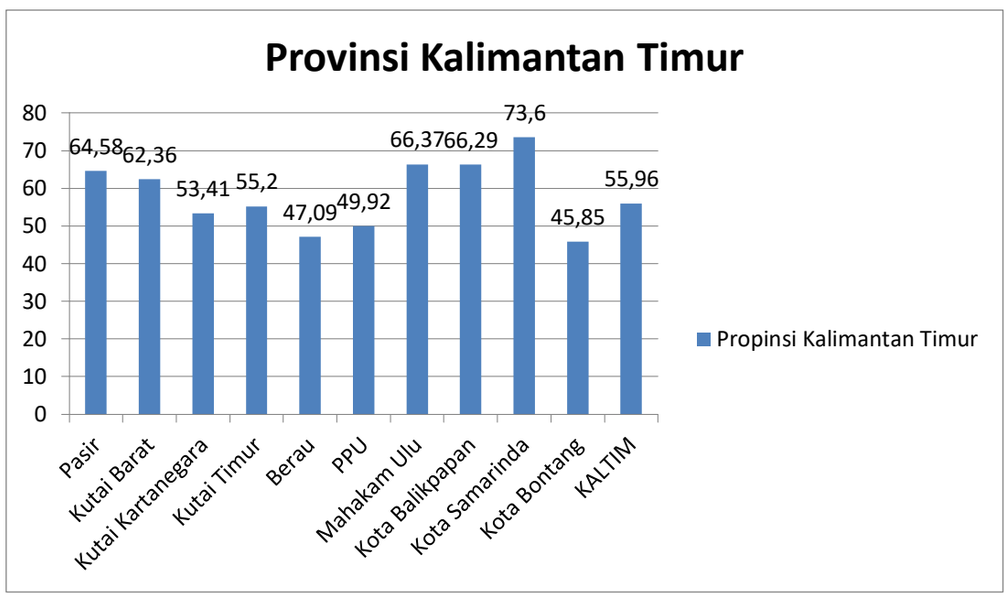

Gambar 3.4. IDG Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota 2015
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selama Tahun 2011 – 2015 Perlindungan terhadap Hak Perempuan dapat memenuhi target Renstra sebesar 1%. Ini terlihat dari Rasio KDRT yang tercapai 1% dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan juga sesuai target di setiap tahunnya. Sehingga Perlindungan Hak Perempuan untuk Tahun 2011 – 2015 sudah sesuai target renstra 2011 – 2016.

Perlindungan anak di Tahun 2011 – 2015 sama halnya dengan perlindungan Hak Perempuan yaitu sudah sesuai target di setiap tahunnya.

Pencapaian dalam tumbuh kembang anak dapat terlihat pencapaiannya dalam penganugrahan Kota Bontang dalam pencapaian Kota Layak Anak di tingkat Nindya pada Tahun 2015.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam indikator rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sudah mencapai target renstra di setiap tahunnya yaitu sebesar 100%. Sehinggauntuk target ini sudah sesuai rencana. Begitu juga halnya dengan indikator rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dengan rencana 6,7% bisa mencapai target disetiap tahunnya sebesar 6,7%.

Jumlah LSM yang direncanakan sebanyak 15 LSM bisa mencapai target disetiap tahunnya sebenyak 15 LSM.LPM Berprestasi, PKK aktif, dan Posyandu aktif juga telah mencapai target sebesar 100%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota BontangTahun 2011 - 2015 terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota BontangTahun 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Urusan Sosial																		
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Jumlah			7	7	7	7	6	6	6	6	10	5	86	86	86	143	83
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%			3,30	3,43	3,55	3,67	3,18	6,00	3,63	19,65	27,64	100	182	106	554	753	3.145
3	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%			3,92	3,98	4,05	4,11	3,86	6,08	4,33	58,42	7,71	11,88	155	109	1.442	188	308
	Urusan Pemberdayaan Perempuan &Perlindungan Anak																		
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	85,43		48,05	48,07	48,08	48,09	49,01	54,73	7,79	85,43	52,66	49,35	114	16	178	110	101
5	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	14,57		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	87,50	92,31	100,00	98,81	100,00	175	185	200	198	200

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
6	Rasio KDRT	%	1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100	100	100	100
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	15,31		17,02	18,00	19,00	19,00	20,00	17,02	86,71	48,76	39,89	50,65	100	482	257	210	253
8	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100		65,00	70,00	75,00	80,00	100,00	87,50	92,31	100,00	98,81	100,00	135	132	133	124	100
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
9	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	6,7		6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	100	100	100	100	100
11	Jumlah LSM	Jumlah	15		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100
12	LPM Berprestasi	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	PKK aktif	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Posyandu aktif	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2011 - 2015

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Urusan SOSIAL																
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	75.575.100	241.935.000	625.840.100	885.676.500	568.978.000	62.262.100	152.094.700	619.581.699	636.845.061	526.979.000	82,38	62,87	99,00	71,90	92,62
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	581.661.500	920.721.500	399.515.500	1.178.095.000	918.785.000	415.542.310	610.493.400	395.520.345	1.091.456.337	801.440.035	71,44	66,31	99,00	92,65	87,23
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	31.950.000	106.645.000	55.825.000	16.765.000	-	21.550.000	89.232.000	55.266.750	16.497.500	-	67,45	83,67	99,00	98,40	0,00
4	Program Pembinaan Panti Asuhan Dan Panti Jompo	-	155.050.000	56.790.000	60.780.000	32.535.000	-	104.675.000	56.222.100	58.914.400	32.308.000	0,00	67,51	99,00	96,93	99,30
5	Program Pembinaan Eks penyandang Penyakit Sosial	-	20.255.000	-	-	-	-	20.255.000	-	-	-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan	211.560.500	528.260.000	283.215.000	554.089.000	99.615.000	203.798.050	388.559.250	280.382.850	531.614.720	75.825.000	96,33	73,55	99,00	95,94	76,12

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Kesejahteraan Sosial															
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	523.145.000	77.150.000	-	-	-	315.961.730	71.318.800	0,00	0,00	0,00	60,40	92,44
URUSAN PPPA																
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	369.100.125	308.014.000	892.230.500	701.147.000	567.340.000	343.263.116	295.419.500	674.554.725	525.628.430	546.670.100	93,00	95,91	75,60	74,97	96,36
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	149.000.000	720.093.000	412.143.500	462.013.000	431.574.300	138.570.000	640.618.700	405.680.620	316.763.900	418.884.088	93,00	88,96	98,43	68,56	97,06
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	350.000.000	-	-	49.990.000	61.947.450	325.500.000	-	-	49.990.000	57.379.450	93,00	0,00	0,00	100,00	92,63
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam	450.231.250	221.260.500	767.387.000	1.026.152.000	236.337.000	418.715.063	218.802.980	700.224.810	841.896.577	223.194.675	93,00	98,89	91,25	82,04	94,44

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	pembangunan															
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.738.460.358	2.882.589.850	1.269.027.600	1.483.652.650	2.714.635.538	2.546.768.132	2.438.685.431	1.269.027.600	963.263.471	2.557.486.709	93,00	84,60	100,00	64,93	94,21
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	503.350.774	529.842.920	1.248.288.040	904.784.350	714.760.000	468.116.220	505.526.500	1.248.288.040	701.200.075	713.857.700	93,00	95,41	100,00	77,50	99,87
7	Program peningkatan disiplin aparatur	29.559.250	31.115.000	-	34.384.000	-	27.490.103	615.000	0	29.328.200	-	93,00	1,98	100,00	85,30	0,00
8	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	88.979.375	93.662.500	130.300.000	291.760.000	287.778.000	82.750.819	78.850.000	130.300.000	153.000.100	278.516.945	93,00	84,19	100,00	52,44	96,78
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51.276.250	53.975.000	81.675.000	66.375.000	1.375.000	47.686.913	53.975.000	81.675.000	66.375.000	1.375.000	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat															
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	535.135.000	997.036.000	1.228.081.000	757.710.000	875.520.000	434.181.450	831.081.800	1.021.669.690	701.989.400	759.536.100	81,13	83,36	83,19	92,65	86,75
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.697.868.900	1.348.190.284	2.991.392.200	2.352.782.000	198.076.530	1.503.869.300	1.038.313.040	2.490.036.780	1.981.854.910	133.189.449	88,57	77,02	83,24	84,23	67,24
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	-	726.900.000	1.766.031.500	3.041.474.500	3.004.742.000	-	525.608.000	1.190.180.200	2.225.679.358	364.655.925	0,00	0,00	0,00	73,18	12,14
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	932.862.000	1.245.060.000	568.020.000	610.145.000	-	263.992.500	999.696.250	387.705.200	502.185.075	0,00	28,30	80,29	68,26	82,31
5	Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin	-	-	-	-	297.075.000	-	-	-	-	253.784.750	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas SosialPemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Perubahan kebijakan politik berpeluang terjadinya disharmoni sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial, akibat mengentalnya perbedaan kepentingan dan perbedaan afiliasi politik
b. Kebijakan Nasional terkait Sosial yang selalu berubah-ubah.
c. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin meningkat.
d. Kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia umumnya.
e. Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan regional sangat rendah
f. Inkonsistensi pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah sosial.
g. Belum komprehensifnya penanganan masalah-masalah sosial di level internasional, nasional, provinsi dengan level Kabupaten/Kota yang ada.
h. Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
i. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
j. Era globalisasi dan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan *character building* masyarakat Bontang.
k. Menghadapai era persaingan global dan perdagangan bebas, belum sepenuhnya masyarakat mampu mempersiapkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi.
l. Kemajuan teknologi yang dapat menggeser nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap dan perilaku masyarakat.
m. Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).

n. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pembangunan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 dimana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara.
b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.
c. Adanya Kebijakan Nasional dalam wujud peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait dengan kesejahteraan sosial.
d. Otonomi daerah disertai perimbangan kewenangan dan keuangan.
e. Adanya konvensi internasional mengenai hak-hakpenyandang cacat.
f. AdanyaKonvensi nasional keserasian sosial.
g. Sinergitas programdengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih periode 2016-2021.
h. Tingginya komitmen Kepala Daerah dalam pelayanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
i. Keunggulan Kota Bontang sebagai daerah pengembangan kawasan industri dan maritim, serta rencana pembangunan Kilang Minyak berpeluang terjadiya pergerakan penduduk dan terbentuknya kelompok masyarakat baru serta tingginya mobilitas penduduk baik WNI maupun WNA.
j. Visi dan Misi daerah berpeluang mewujudkan *good governance* dan mengikis praktek KKN dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat.
k. Budaya dan kelembagaan masyarakat mendukung partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan..
l. Adanya komitmen pemerintah Kota Bontang dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangdalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   1) Belum maksimalnya peningkatan kapasitas aparatur
   2) Penempatan dan formasi aparatur belum sesuai dengan keahlian dan bidang tugas
   3) Layanan administratif perkantoran dan layanan publikbelum maksimal
   4) Belum maksimalnya disiplin aparatur
   5) Kurang memadainya sarana prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas SosialPemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang.
2. Permasalahan terkait Rehabilitasi SosialPerlindungan dan Jaminan sosial
   1) Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
   2) Belum optimalnya penanganan anak terlantar diluar panti
   3) Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin (PKH, ASLUT, ASPDB, PBI)
   4) Belum terkoordinasinya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
3. Permasalahan terkait Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   1) Verifikasi dan Validasi data kurang akurat terhadap fakir miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme bantuan kesejahteraan sosial
   2) Kurangnya peningkatan kapasitas SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
   3) Kurangnya sosialisasi mengenai Penerbitan izin pengumpulan sumbangan Daerah kabupaten/kota
4. Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
   1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain
   2) Belum semua perangkat daerah melaksanakan PUG dan PPRG
   3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari

rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.

4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
5) Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan dan anak
6) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
7) Perempuan dan anak banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan dan anak sangat rentan terhadap kekerasan.
8) Belum tersedianya rumah aman.
9) Kurangnya koordinasi dengan lembaga pelayanan perempuan lainnya.
10) Tingginya korban kekerasan pada anak.
11) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) belum tertangani secara optimal.
12) Tidak teridentifikasi data pekerja anak.
13) Belum adanya sistem pelaksanaan capaian Kota Layak Anak dari OPD terkait yang berlanjut secara otomatis
14) Pembentukan Forum Anak belum menjadi prioritas utama di TingkatKelurahan
15) Masih kurangnya sarana dan prasarana Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar.
16) Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), sarana dan prasarana sesuai standar.
17) Belum optimalnya Sekolah Ramah Anak (SRA) (PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs) sesuai standar

5. Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat
   1) Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
   2) Belum maksimalnya swadaya masyarakat dalam pembangunan
   3) Keterbatasan SDM Masyarakat dan aparatur pelaksana Lembaga Kemasyarakatan yang belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rujukan utama penyusunan materi Renstra Perangkat Daerah secara keseluruhan. Sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010, yang menjadi rujukan dalam penyusunan Visi dan Misi RPJMD Kota Bontang 2016-

2021,maka pertimbangan utama dalam menyusun RPJMD 2016-2021 adalahVisi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada 2015 dan Visi dan Misi RPJPD Kota Bontang, serta RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN. Adapun Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang 2016-2021adalah***"Menguatkan Bontangsebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industriyang Bertumpupada Kualitas Sumberdaya Manusiadan Lingkungan Hidupuntuk Kesejahteraan Masyarakat".***

Visi ini diharapkan akan mewujudkankeinginan dan amanat masyarakat Kota Bontang dengan tetap mengacu pada pencapaian Tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Bontang dan selaras dengan RPJM Nasional 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 serta RPJPD Kota Bontang 2005-2025. Adapun makna dari butir-butir Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kota Maritim dimaksudkan sebagai domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore).

Berkebudayaan Industri dimaksudkan sebagai sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya sehingga ke depan industri maritim dan industri petrokimia bisa berjalan secara sinergi dan saling menunjang**.**

Kualitas Sumberdaya Manusia dimaksudkan bahwa kualitas sumberdaya manusia yang baik menjadi tumpuhan utama untuk mewujudkan Visi tersebut, sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke depankualitas sumber daya manusia semakin meningkat baik pendidikan maupun kesehatanya melalui peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Kualitas Lingkungan Hidup dimaksudkan bahwa pembangunan harus berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Bontang, yaitu dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumberdaya alam melalui mekanisme yang adil, bermartabat dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Kesejahteraan Masyarakatdimaksudkan tujuan akhir pembangunan Kota Bontang, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang terpenuhi hak-hak dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, berkualitas dan memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

Dalam mewujudkan Visi tersebutditempuh melalui 3 (tiga) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Merupakan sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Salah satu faktor penting dalam menjadikan sebuah kota sebagai Smart City adalah kualitas sumber daya manusianya yang handal. Sehingga untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai Smart City perlu peningkatan kualitas Sumber daya manusianya.

Secara operasional upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, tenaga kerja dan sektor permbangunan lainnya.

b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melaluipeningkatan kualitas lingkungan hidup.

Merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan, Green City juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (*stakeholders*).

c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Bontang sebagai Creative City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Pengembangan bontang sebagai Creative City merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka)dan modal entrepreuneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke I adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang mendukung pencapaian. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasiyang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangadalah sebagai berikut:

1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar;

   Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:PMKS yang memperoleh bantuan sosial

2. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar daninklusifitasnya.

   Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelengara kesejahteraan sosial:

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Pendamping yang meningkat kualitasnya dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial;
3. Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial.

   Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

2. Telaahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak

a. Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
   1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
   2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan yang berumur di atas 18 tahun.
2. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

   Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

c. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

d. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

e. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

3. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan taraf	• Kurang validnya data PMKS yang menerima	• Kurangnya kesadaran	• Tersedianya aplikasi BDT

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	bantuan melalui mekanisme bantuan kesejahteraan sosial	pihak terkait • Terbatasnya personil yang menangani masalah data	melalui SIKS-NG
2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan penyelengara kesejahteraan sosial	• Belum tersedianya Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) untuk lanjut usia laki – laki • Belum adanya lembaga yang menangani PMKS penyandang disabilitas • Belum adanya lembaga yang menangani tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial • Kurangnya sosialisasi mengenai Penerbitan izin pengumpulan sumbangan Daerah kabupaten/kota • Kurangnya peningkatan kapasitas SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat • Belum tersedianya alat angkut logistic • Tidak tersedianya peningkatan kapasitas SDM terhadap kesiapsiagaan	• Terbatasnya personil data terpadu • Terbatasnya anggaran dalam penyediaan sapras • Kurangnya pembinaan SDM	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat
3	Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) belum optimal.	• Rendahnya pemahaman tentang PPRG bagi pemangku kebijakan	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Anak
4	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Kurangnya kesadaran dari korban, keluarga, dan masyarakat sekitar tempat kejadian untuk melaporkan ke pihak berwenang	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja/buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk		
5	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Tingginya korban kekerasan pada anak • ABH belum tertangani secara optimal • Tidak teridentifikasi data pekerja anak • Pembentukan Forum Anak belum menjadi prioritas utama di Tingkat Kelurahan • Masih kurangnya sarana dan prasarana RBRA sesuai standar • Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM Terlatih KHA, sarana dan prasarana sesuai	• Kesulitan dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dengan instansi terkait	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		standar		
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	• Belum optimalnya pembentukan PATBM • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan perlindungan khusus kepada anak	• Tingkat kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk perlindungan khusus kepada anak
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	• Keterbatasan SDM Masyarakat dan aparatur pelaksana masih belum optimal • Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan dan fasilitasi program masih terbatas	• Terbatasnya personil baik kuantitas dan kualitas • Terbatasnya anggaran dalam penyediaan sarana dan prasaran	• Adanya komitmen kepala daerah

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangsebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia.
3. Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.

SedangkanRenstra Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangadalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Dan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Timur

1. Meningkatkan Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi.
3. Penerapan pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan daya partisipasi dan inovasi masyarakat
5. Peningkatan kerjasama lintas sektoral sehingga tercipta hubungan yang serasi, selaras, seimbang dan harmoni dalam melaksanakan proses pembangunan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam	• Validasi data kurang akurat fakir miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme	• Kurangnya kesadaran pihak terkait • Terbatasnya	Meningkatkan jaminansosial bagi fakir miskin

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemenuhan kebutuhan dasar	bantuan kesejahteraan sosial lainnya	personil yang menangani masalah data	
2	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia	• Tidak akuratnya data dari Panti • Belum tersedianya Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) untuk lanjut usia laki – laki • Belum adanya lembaga yang menangani PMKS penyandang disabilitas • Belum adanya lembaga yang menangani tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial • Tidak tersedianya RPTC dan sapras pendukungnya	• Terbatasnya personil data terpadu • Terbatasnya anggaran dalam penyediaan sapras	Meningkatkan rehabilitasi dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
3	Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	• Kurangnya peningkatan kapasitas SDM tenaga kesejahteraan sosial masyarakat	• Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait • Kurangnya pembinaan SDM	Meningkatkan pemberdayaan sosial dalam penanganan PMKS
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana	• Belum tersedianya alat angkut logistik • Tidak tersedianya peningkatan kapasitas SDM terhadap kesiapsiagaan	• Terbatasnya personil dalam penangan bencana • Terbatasnya anggaran dalam penyediaan sapras	Meningkatkan jaminan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
5	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. • Belum semua PD melaksanakan PPRG	program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
6	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	• Tingginya kasus kekerasan terhadap • perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Belum tersedianya rumah aman. • Kurangnya koordinasi dengan lembaga pelayanan perempuan lainnya.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
7	Terimplementasi kannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	• Tingginya korban kekerasan pada anak. • ABH belum tertangani secara optimal. • Tidak teridentifikasi data pekerja anak. • Belum adanya sistem pelaksanaan capaian Kota Layak Anak dari OPD terkait yang berlanjut secara otomatis. • Pembentukan Forum Anak belum menjadi prioritas utama di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. • Masih kurangnya sarana dan prasarana RBRA sesuai standar.	• Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pembentukan PATBM • Terbatasnya personil yang melayani	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		• Belum ada Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). • Masih Kurangnya Pusat Kreativitas Anak (PKA). • Kurangnya Jumlah dan Kualitas SDM Terlatih KHA, sarana dan prasarana sesuai standar. • Belum optimalnya Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar • Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Belum terstandarnya Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	
8	Meningkatkan Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa	• Keterbatasan SDM Masyarakat dan aparatur pelaksana Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat masih belum optimal • Ketersediaan dukungan sarana dan Prasarana dalam rangka pelayanan dan fasilitasi program masih terbatas	• Terbatasnya personil baik kuantitas dan kualitas • Terbatasnya anggaran dalam penyediaan sapras	Meningkatkan keberdayaan masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
9	Mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi	• Keterbatasan SDM Masyarakat dan aparatur pelaksana masih belum optimal • Ketersediaan dukungan sarana dan Prasarana dalam rangka pelayanan dan fasilitasi program masih terbatas	• Terbatasnya personil baik kuantitas dan kualitas • Terbatasnya anggaran dalam penyediaan sapras	Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat
10	Penerapan pembinaan dan pelatihan yang	• Keterbatasan SDM Masyarakat dan aparatur pelaksana	• Terbatasnya personil baik kuantitas dan	Adanya dukungan dari pemerintah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	berkelanjutan	masih belum optimal • Ketersediaan dukungan sarana dan Prasarana dalam rangka pelayanan dan fasilitasi program masih terbatas	kualitas • Terbatasnya anggaran dalam penyediaan sapras	provinsi dan pusat
11	Meningkatkan daya partisipasi dan inovasi masyarakat	• Keterbatasan SDM Masyarakat dan aparatur pelaksana masih belum optimal • Ketersediaan dukungan sarana dan Prasarana dalam rangka pelayanan dan fasilitasi program masih terbatas	• Terbatasnya personil baik kuantitas dan kualitas • Terbatasnya anggaran dalam penyediaan sapras	Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat
12	Peningkatan kerjasama lintas sektoral sehingga tercipta hubungan yang serasi, selaras, seimbang dan harmoni dalam melaksanakan proses pembangunan	• Keterbatasan SDM Masyarakat dan aparatur pelaksana masih belum optimal • Ketersediaan dukungan sarana dan Prasarana dalam rangka pelayanan dan fasilitasi program masih terbatas	• Terbatasnya personil baik kuantitas dan kualitas • Terbatasnya anggaran dalam penyediaan sapras	Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakattidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakatdilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:.

1. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Belum optimalnya peran/keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya kesejahteraan sosial
3. Kompleknya permasalahan terkait Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
4. Belum terlaksananya Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada setiap perangkat daerah
5. Masih rendahnya keterpilihan perempuan dalam legislatif.
6. Belum optimalnya kelembagaan PUG.
7. Belum optimalnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2021 yaitu:

" MENGUATKAN BONTANG SEBAGAI KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN INDUSTRI YANG BERTUMPU PADA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT "

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan Tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan pelindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarustamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan
3. Meningkatnya Peran Serta Partisipasi dan Swadaya Masyarakat/Lembaga Secara Aktif Dalam Proses Pembangunan

Yang selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Kemiskinan mencapai 4,00%	1. Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	76,10	80,00	80,55	85,21	88,27
2.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan pelindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarustamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 88,00 - Score Kota Layak Anak 800 (Kategori Nindya)	2. Meningkatnya Peran Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	1. Prosentase Perempuan di Lembaga Pemerintah	12,43	15,00	15,25	15,50	16,00
				2. Prosentase Perempuan di Lembaga Swasta	87,57	85,00	84,75	84,50	84,00
				3. Prosentase Angkatan Kerja Perempuan	40,00	40,25	41,00	42,50	43,75
				4. Ratio KDRT	0,039	0,1	0,1	0,1	0,1

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
3.	Meningkatnya Peran Serta Partisipasi dan Swadaya Masyarakat/Lembaga Secara Aktif Dalam Proses Pembangunan	Indeks Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif 100%	3. Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat/Lembaga Dalam Pembangunan wilayah	1. LPM Aktif (%)	100	100	100	100	100
				2. PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
				3. Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100
				4. Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan Wilayah (%)	-	1	1,1	1,2	1,4

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian Tujuan. Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) & Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Meningkatkan Jaminan & Perlindungan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 4. Pembaharuan Data melalui Sistem Informasi PMKS & PSKS	1. Fasilitasi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) & Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2. MenguatkanPelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Memperluas Jangkauan Pelayanan Jaminan & Perlindungan Sosial PMKS 4. Menyajikan Data PMKS terbaru
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan pelindungan khusus anak	Meningkatnya Peran Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	1. Meningkatkan peran & partisipasi serta perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan Kualitas	1. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan & anak di bidang pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik,

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarustamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan		penanganan perlindungan perempuan & anak	hukum, sosial, budaya & lingkungan hidup 2. Peningkatan kesetaraan dan partisipasi gender
3	Meningkatnya Peran Serta Partisipasi dan Swadaya Masyarakat/Lembaga Secara Aktif Dalam Proses Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat/Lembaga Dalam Pembangunan wilayah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah dengan penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat, memfasilitasi pelaku usaha, membangun mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan melalui musrenbang yang direalisasikan dalam RKPD, penguatan data basis RT &Kelurahan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Pembinaan & pelatihan lembaga kemasyarakatan yang ada, menerapkan sistem pelatihan & pengembangan SDM pengelola pemerintahan kelembagaan, dan menumbuh kembangakan posyantek

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Programdan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

6.1.1 Program

Bertolak dari Sasaran-Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan, disusunlah program-program kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
8. Program pemberdayaan sosial.
9. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
10. Program perlindungan dan jaminan sosial.
11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
12. Program penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
13. Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
14. Program peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
16. Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
17. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
18. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
19. Program peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
20. Program pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat
21. Program Pengembangan Data/Informasi
22. Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin
23. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
24. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

6.1.2 Kegiatan

Untuk mewujudkan program di atas, disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang merupakan penjabaran Strategi dan Kebijakan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang digariskan oleh Visi dan Misi.

Kegiatan-kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontangyang akan dilakukan sebagai penjabaran program-program adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
   a. Penyediaan jasa surat-menyurat.
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
   c. Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
   d. Penyediaan alat tulis kantor.
   e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
   f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
   h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
   i. Penyediaan bahan logistik kantor.
   j. Penyediaan makanan dan minuman.
   k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
   l. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
   a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
   b. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional.
   c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
   d. Pengadaan Meubelair.
   e. Pemeliharaan rutin/berkala komputer.
3. Program peningkatan disiplin aparatur yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan :
   a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
   a. Pendidikan dan pelatihan formal.
   b. Peningkatan kapasitas aparatur Jabatan Fungsional.
   c. Pendidikan dan pelatihan Character Building.
   d. Pendidikan dan parenting skill.
   e. Pembinaan mental dan fisik aparatur.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja PD.

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis anggaran.
c. Penyusunan akuntabilitas Keuangan PD.
d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
e. Penyusunan Renja PD
f. Penyusunan Renstra PD.
g. Review Renstra PD.

6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
   a. Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah.
   b. Publikasi Kegiatan Pembangunan.
7. Program pemberdayaan sosial yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
   a. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Pesisir.
   b. Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin.
   c. Pemberdayaan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
   d. Pemberdayaan Sosial Pemulung.
   e. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Karang Taruna.
   f. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
   g. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial PSM.
   h. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
   i. Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesejahteraan Sosial.
   j. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
   k. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pekerja Sosial Profesional.
   l. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Penyuluh Sosial Profesional.
   m. Pemberdayaan Forum Coorporate Social Responbility (CSR) Kesejahteraan Sosial (CSR-Kessos).
   n. Pembinaan dan pelestarian Kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan Kesetiakawanan sosial.
   o. Penerbitan izin Pemngutan Uang atau Barang (PUB).
8. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosialyang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
   a. Pelayanan dan penanganan terhadap Eks penyakit Kejiwaan, Disabilitas Fisik, Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Gangguan Sensorik.
   b. Pelayanan dan penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Tua Susila (WTS), korban Traficking, Eks korban NAPZA, Penyandang HIV/AIDS (ODHA) Luar Panti, Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP) dan Kelompok Minoritas.
   c. Pelayanan dan Penanganan terhadap Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Eks Penyakit Kronis.

d. Pelayanan dan penanganan terhadap balita terlantar, anak terlantar, orang terlantar, lansia terlantar, lanjut usia, lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.
e. Pelayanan dan penanganan terhadap korban tindak kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
f. Pelayanan dan penanganan terhadap PMKS dalam Rumah Singgah.

9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
a. Tata kelola logistik bencana dan pemanfaatan serta pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dan penguatan sosial.
b. Asuransi kesejahteraan sosial untuk PMKS.
c. Kesiapsiagaan sumber daya, peringatan dini dan mitigasi bencana.
d. Penyusunan Peta sosia dan pembaharuan data kemiskinan terpad (PBI, PMKS, PSKS, KPS/KKS, KIS, PKH, KIP, KUBE, Askessos).
e. Fasilitasi pelaksanaan Pogram Keluarga Harapan.
f. Fasilitasi perlindungan korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial dan korban perdagangan orang.
g. Sosialisasi dan Fasilitasi Pencegahan Bencana Sosial
h. Pemberian bantuan santunan kematian bagi PMKS dan lainnya di Wilayah Kota Bontang.
i. Pemberian santunan kematian bagi warga yang tercatat pada kartu keluarga di wilayah Kota Bontang

10. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

11. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan yang diwujudkan dalam kegiatan :
a. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
b. Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan.
c. Satuan gugus tugas Kota Layak Anak.

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anakyangdiwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
a. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
b. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
d. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
e. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
f. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.

13. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalampembangunanyang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:.
a. Pembinaan organisasi perempuan.

b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
c. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
d. Pelaksanaan, pelatihan, pembinaan dan penilaian P2WKSS.
e. Peningkatan kapasitas anggota DWP.
f. Pembinaan gabungan organisasi wanita Kota Bontang.

14. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuanyang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
    a. Sosialisasi dan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
    b. Pelatihan TOT SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
    c. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.
    d. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
    a. Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
14. Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
    a. Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat)
    b. Pembinaan dan Pelatihan PKK (Pokja I)
    c. Pembinaan dan Pelatihan PKK (Pokja II)
    d. Pembinaan dan Pelatihan PKK (Pokja III)
    e. Pembinaan dan Pelatihan PKK (Pokja IV)
    f. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
    g. Pembinaan dan Pelatihan LPM
    h. Pokjanal Posyandu
15. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
    a. Peningkatan Semangat Gotong Royong
    b. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
    c. Pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur untuk Tokoh Masyarakat
    d. Pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur untuk Ketua RT
16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomiyang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan:
    a. Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat
    b. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
    c. Pelatihan Keterampilan Manajemen Kelompok Usaha RTS
17. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
    a. Pemasyarakatan Dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna
18. Program Upaya Perubahan sikap dan tingkah laku dan moral.
19. Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial BudayaMasyarakat

20. Program Pengembangan Data/Informasi.
    a. Penyusunan Profil Kelurahan
21. Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin
    a. Peningkatan SDM Bagi Masyarakat Yang Belum Bekerja
    b. Peningkatan SDM Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga
    c. Peningkatan SDM Tenaga Kerja Sopir
    d. Peningkatan SDM Keluarga Nelayan
    e. Peningkatan SDM Tenaga Kerja Buruh Lepas
22. ProgramPeningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
    a. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)
    b. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sebagaimana terlampir (Tabel 6.1)

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	**Tingkat Kemiskinan**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**1.13.01.0**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**4.834.558.750**	**100%**	**5.809.180.500**	**100%**	**6.969.971.600**	**100%**	**8.362.816.420**	**100%**	**10.034.115.254**	**100%**	**36.010.642.524**	**DSP3M**	**Bontang**
					1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Output :** Jumlah materai yang dibeli **Outcome :** Prosentase Surat yang terkirim/tersampaikan	1.100 Buah	1.100 Buah	8.800.000	1.100 Buah	10.560.000	1.100 Buah	12.672.000	1.100 Buah	15.206.400	1.100 Buah	18.247.680	5.500 Buah	65.486.080		
					2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**Output :** Jumlah bidang/bagian yang dilayani **Outcome :** Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Bidang & 1 Sekretariat	4 Bidang & 1 Sekretariat	65.316.000	4 Bidang & 1 Sekretariat	78.379.200	4 Bidang & 1 Sekretariat	94.055.040	4 Bidang & 1 Sekretariat	112.866.048	4 Bidang & 1 Sekretariat	135.439.258	4 Bidang & 1 Sekretariat	486.055.546		
					3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	**Output :** Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang mendapat jasa KIR dan STNK **Outcome :** Meningkatnya kinerja pegawai	27 Unit	27	130.000.000	27 Unit	156.000.000	27	187.200.000	27	224.640.000	27	269.568.000	27 Unit	967.408.000		
					4 Penyediaan alat tulis kantor	**Output :** Jumlah bidang/bagian yang dilayani **Outcome :** Tertib administrasi	4 Bidang & 1 Sekretariat	4 Bidang & 1 Sekretariat	101.004.000	4 Bidang & 1 Sekretariat	121.204.800	4 Bidang & 1 Sekretariat	145.445.760	4 Bidang & 1 Sekretariat	174.534.912	4 Bidang & 1 Sekretariat	209.441.894	4 Bidang & 1 Sekretariat	751.631.366		
					5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Output :** Jumlah bidang/bagian yang dilayani **Outcome :** Peningkatan kinerja	4 Bidang & 1 Sekretariat	4 Bidang & 1 Sekretariat	84.530.000	4 Bidang & 1 Sekretariat	101.436.000	4 Bidang & 1 Sekretariat	121.723.200	4 Bidang & 1 Sekretariat	146.067.840	4 Bidang & 1 Sekretariat	175.281.408	4 Bidang & 1 Sekretariat	629.038.448		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Output :** Jumlah Komponen Listrik/Penerangan yang Disediakan **Outcome :** Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik	-	12 Bulan	9.500.000	12 Bulan	10.450.000	12 Bulan	11.495.000	12 Bulan	12.644.500	12 Bulan	13.908.950		57.998.450		
					7 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	**Output :** Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang disediakan **Outcome :** Peningkatan kinerja	-	11 Jenis	204.630.710	11 Jenis	245.556.852	11 Jenis	294.668.222	11 Jenis	353.601.867	11 Jenis	424.322.240	11 Jenis	1.522.779.892		
					8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	**Output :** Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan **Outcome :** Meningkatnya wawasan dan	5 Jenis	5 Jenis	55.840.000	5 Jenis	67.008.000	5 Jenis	80.409.600	5 Jenis	96.491.520	5 Jenis	115.789.824	5 Jenis	415.538.944		
					9 Penyediaan bahan logistik kantor	**Output :** Tersedianya Peralatan & Bahan Kebersihan, Obat-obatan & Perlengkapan **Outcome :** Terciptanya suasana kantor yang lebih bersih dan kondisi kesehatan pegawai yang lebih baik	12 Bulan	12 Bulan	45.850.000	12 Bulan	55.020.000	12 Bulan	66.024.000	12 Bulan	79.228.800	12 Bulan	95.074.560	60 Bulan	341.197.360		
					10 Penyediaan makanan dan minuman	**Output :** Tersedianya makanan dan minuman **Outcome :** Meningkatnya kinerja	12 Bulan	12 Bulan	139.140.000	12 Bulan	166.968.000	12 Bulan	200.361.600	12 Bulan	240.433.920	12 Bulan	288.520.704	60 Bulan	1.035.424.224		
					11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	**Output :** Koordinasi dan Konsultasi ke luar/dalam daerah **Outcome :** Meningkatnya kinerja pegawai	12 Bulan	12 Bulan	662.720.000	12 Bulan	795.264.000	12 Bulan	954.316.800	12 Bulan	1.145.180.160	12 Bulan	1.374.216.192	60 Bulan	4.931.697.152		
					12 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	**Output :** Tersedianya Tenaga Administrasi **Outcome :** Meningkatnya kinerja PTT dan honorer	34 Orang	34 Orang	3.317.228.040	36 Orang	3.980.673.648	36 Orang	4.776.808.378	36 Orang	5.732.170.053	36 Orang	6.878.604.064	36 Orang	24.685.484.182		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					13 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**Output :** Pemeliharaan Tempat **Outcome :** Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih dan Sehat	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	20.660.000	12 Bulan	24.792.000	12 Bulan	29.750.400	12 Bulan	35.700.480	12 Bulan	120.902.880		
				1.13.01.0	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai**	**100%**	**100%**	**1.269.770.000**	**100%**	**1.408.926.000**	**100%**	**1.655.487.000**	**100%**	**1.947.837.780**	**100%**	**2.294.784.054**	**100%**	**8.576.804.834**		
					1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	**Output :** Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara **Outcome :** Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	27 Unit	27	820.270.000	27 Unit	984.324.000	27 Unit	1.181.188.800	27 Unit	1.417.426.560	27 Unit	1.700.911.872	27 Unit	6.104.121.232		
					2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	**Output :** Jumlah Kendaraan **Outcome :** Pemenuhan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	1 Unit	300.000.000	1 Unit	254.122.000	1 Unit	279.534.200	1 Unit	307.487.620	1 Unit	338.236.382	5 Unit	1.479.380.202		
					3 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	**Output :** Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara **Outcome :** Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	1 Gedung	1 Gedung	22.500.000	1 Gedung	27.000.000	1 Gedung	32.400.000	1 Gedung	38.880.000	1 Gedung	46.656.000	1 Gedung	167.436.000		
					4 Pengadaan Meubelair	**Output :** Jumlah Meubelair yang diadakan **Outcome :** Pemenuhan Meubelair Kantor	-	3 Jenis	89.200.000	3 Jenis	98.120.000	3 Jenis	107.932.000	3 Jenis	118.725.200	3 Jenis	130.597.720	3 Jenis	544.574.920		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)												Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					5 Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	**Output :** Jumlah Komputer/ Laptop/Printer yang dipelihara **Outcome :** Terpeliharanya komputer	13 Unit	13	37.800.000	13 Unit	45.360.000	13 Unit	54.432.000	13 Unit	65.318.400	13 Unit	78.382.080	13 Unit	281.292.480		
				1.13.01.0	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur**	**100%**	**100%**	**1.730.811.419**	**100%**	**437.645.000**	**100%**	**285.174.000**	**100%**	**623.907.360**	**100%**	**410.650.560**	**100%**	**3.488.188.339**		
					1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	**Output :** Jumlah Pakaian Dinas Harian & Hari-hari Tertentu **Outcome :** Keseragaman pakaian	81 Stel	-	-	81 Stel	200.000.000	-	-	81 Stel	281.698.560	-	-	162 stel	481.698.560		
					2 Peningkatan Kinerja Aparatur	**Output :** Jumlah Aparatur PNS **Outcome :** Meningkatnya Kinerja Aparatur PNS	-	80%	1.730.811.419	100%	237.645.000	12 Bulan	285.174.000	12 Bulan	342.208.800	12 Bulan	410.650.560	12 Bulan	3.006.489.779		
				1.13.01.0	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pegawai**	**100%**	**100%**	**696.348.000**	**100%**	**806.284.800**	**100%**	**935.275.680**	**100%**	**1.086.838.128**	**100%**	**1.265.163.797**	**100%**	**4.789.910.405**		
					1 Pendidikan dan pelatihan formal	**Output :** Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan **Outcome :** Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pegawai	8 Orang	24 Orang	240.000.000	28 Orang	288.000.000	32 Orang	345.600.000	36 Orang	414.720.000	40 Orang	497.664.000	40 Orang	1.785.984.000		
					2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional	**Output :** Jumlah Pegawai **Outcome :** Penilaian Jabatan Fungsional	-	14 Orang	142.892.000	15 Orang	157.181.200	16 Orang	172.899.320	17 Orang	190.189.252	18 Orang	209.208.177	18 Orang	872.369.949		
					3 Pendidikan dan Pelatihan Character Building	**Output :** Jumlah Pegawai **Outcome :** Tingkat Pemenuhan Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	75 Orang	108.900.000	75 Orang	119.790.000	75 Orang	131.769.000	75 Orang	144.945.900	75 Orang	159.440.490	75 Orang	664.845.390		
					4 Pendidikan dan parenting skill	**Output :** Jumlah Pegawai **Outcome :** Tingkat Pemenuhan Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	75 Orang	41.536.000	75 Orang	45.689.600	75 Orang	50.258.560	75 Orang	55.284.416	75 Orang	60.812.858	75 Orang	253.581.434		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					5 Pembinaan mental dan fisik aparatur	**Output :** Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik **Outcome :** Terciptanya kerjasama dan kekompakan berorganisasi	1 Kegiatan	1	163.020.000	1	195.624.000	1	234.748.800	1	281.698.560	1	338.038.272	5	1.213.129.632		
				1.13.01.0	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran**	**100%**	**100%**	**2.500.000**	**100%**	**37.750.000**	**100%**	**3.025.000**	**100%**	**3.327.500**	**100%**	**69.600.730**	**100%**	**116.203.230**		
					1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Output :** Laporan Capaian **Outcome :** Pemenuhan laporan kinerja	-	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	550.000	1 Dokumen	605.000	1 Dokumen	665.500	1 Dokumen	732.050	5 Dokumen	3.052.550		
					2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis realisasi Anggaran	**Output :** Laporan Keuangan semester **Outcome :** Pemenuhan laporan realisasi keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	550.000	1 Dokumen	605.000	1 Dokumen	665.500	1 Dokumen	732.050	5 Dokumen	3.052.550		
					3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	**Output :** Laporan Akuntabilitas **Outcome :** Pemenuhan laporan akuntabilitas keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	550.000	1 Dokumen	605.000	1 Dokumen	665.500	1 Dokumen	732.050	5 Dokumen	3.052.550		
					4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	**Output :** Laporan Keuangan **Outcome :** Pemenuhan laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	550.000	1 Dokumen	605.000	1 Dokumen	665.500	1 Dokumen	732.050	5 Dokumen	3.052.550		
					5 Penyusunan Renja SKPD	**Output :** Renja SKPD **Outcome :** Pemenuhan Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	1 Dokumen	550.000	1 Dokumen	605.000	1 Dokumen	665.500	1 Dokumen	732.050	5 Dokumen	3.052.550		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					6 Penyusunan Renstra SKPD	**Output :** Tersusunnya Renstra 2021-2026 **Outcome :** Meningkatnya kualitas perencanaan jangka menengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	65.940.480	1	65.940.480		
					7 Review Renstra SKPD	**Output :** Tersedianya dokumen review renstra 2016-2021 **Outcome :** Meningkatnya kualitas perencanaan jangka menengah	-	-	-	1 Dokumen	35.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	35.000.000		
				1.13.01.1	**Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah**	**Penyebarluasan informasi pelayanan publik**	**100%**	**100%**	**351.450.000**	**100%**	**421.740.000**	**100%**	**506.088.000**	**100%**	**607.305.600**	**100%**	**728.766.720**	**100%**	**2.615.350.320**		
					1 Pelaksanaan pameran Pembangunan Daerah	**Output :** Pelaksanaan Pameran Pembangunan **Outcome:** Penyebarluasan informasi pelayanan publik	-	1 Kegiatan	101.350.000	1 Kegiatan	121.620.000	1 Kegiatan	145.944.000	1 Kegiatan	175.132.800	1 Kegiatan	210.159.360	5 Kegiatan	754.206.160		
					2 Publikasi Kegiatan Pembangunan	**Output :** Publikasi & Informasi ke Masyarakat **Outcome:** Pemberitaan Melalui Media Massa & Media Elektronik	-	2 Kegiatan	250.100.000	2 Kegiatan	300.120.000	2 Kegiatan	360.144.000	2 Kegiatan	432.172.800	2 Kegiatan	518.607.360	10 Kegiatan	1.861.144.160		
					Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial			**20%**	**81.500.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**20%**	**81.500.000**		
					1 Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	**Output :** Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial **Outcome :** Jumlah PMKS yang	-	1 Tahun	81.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	81.500.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				1.13.01.1	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Presentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**24%**	**31%**	**1.450.468.880**	**38%**	**1.910.027.300**	**45%**	**2.452.192.740**	**52%**	**2.649.101.974**	**60%**	**2.869.769.931**	**60%**	**11.331.560.825**		
					1 Kegiatan urusan jaminan sosial bagi disabilitas ganda terlantar melalui asistensi sosial orang dengan kecacatan berat (ASODKB)	**Output :** 1 Jumlah klien yang mendapatkan alat bantu medis untuk disabilitas 2 Jumlah klien yang mendapatkan bantuan sembako **Outcome :** 1 Terlayaninya penerima manfaat dalam hal pelayanan sosial 2 Tersubtitusinya fungsi tubuh yang mengalami gangguan/kecacatan 3 Terpenuhinya kebutuhan dasar penerima manfaat	1 Paket 30 Orang	1 Paket 30 Orang	100.000.000 150.000.000	1 Paket 30 Orang	110.000.000 160.000.000	1 Paket 30 Orang	120.000.000 170.000.000	1 Paket 30 Orang	130.000.000 180.000.000	1 Paket 30 Orang	140.000.000 190.000.000	1 Paket 30 Orang	600.000.000 850.000.000		
					2 Kegiatan pengoordinasian dan pengendalian penanganan urusan jaminan sosial lanjut usia terlantar (tidak potensial dan bridden)	**Output :** 1 Jumlah klien yang mendapatkan layanan asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) 2 Jumlah klien ASLUT yang mendapatkan bantuan sembako dan kebutuhan dasar **Outcome :** 1 Terlayaninya penerima manfaat dalam hal pelayanan sosial 2 Terpenuhinya kebutuhan dasar penerima manfaat	- 30 Orang	28 Orang 30 Orang	100.000.000 100.000.000	28 Orang 30 Orang	110.000.000 110.000.000	28 Orang 30 Orang	120.000.000 120.000.000	28 Orang 30 Orang	130.000.000 130.000.000	28 Orang 30 Orang	140.000.000 140.000.000	28 Orang 30 Orang	600.000.000 600.000.000		
					3 Kegiatan jaminan sosial bagi keluarga rentan (pencari nafkah sektor informal) dan lingkungan sosialnya	**Output :** 1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan 2 Jumlah pekerja sektor informal peserta ASKESOS mendapatkan pendampingan	- 1.085 Orang	400 Orang 1.085 Orang	35.000.000 15.000.000	400 Orang 1.085 Orang	35.000.000 15.000.000	400 Orang 1.085 Orang	35.000.000 15.000.000	400 Orang 1.085 Orang	35.000.000 15.000.000	400 Orang 1.085 Orang	35.000.000 15.000.000	400 Orang 1.085 Orang	175.000.000 75.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Outcome : 1 Tersosialisasikannya program ASKESOS untuk PMKS di kota Bontang 2 Terfasilitasinya ASKESOS untuk PMKS dan Pekerja Sektor Informal Kota Bontang															
					4 Kegiatan jaminan sosial kepada balita, anak yatim piatu, lanjut usia, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, penyakit kronis melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	**Output :** 1 Jumlah pendamping yang mengikuti pelatihan/diklat dan mendapatkan bantuan biaya operasional 2 Jumlah peserta PKH yang mengikuti sosialisasi program **Outcome :** 1 Pendamping yang memiliki keterampilan 2 Teroptimalkannya kegiatan pendampingan	- 856 Orang	10 Orang 856 Orang	150.000.000 75.000.000	10 Orang 856 Orang	150.000.000 75.000.000	10 Orang 856 Orang	150.000.000 75.000.000	10 Orang 856 Orang	150.000.000 75.000.000	10 Orang 856 Orang	150.000.000 75.000.000	50 Orang 856 Orang	750.000.000 375.000.000		
					5 Pemberian Bantuan Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga	**Output :** Jumlah penerima Santunan Kematian **Outcome :** Tersantuni dan tertib administrasi kematian	370 Jiwa	476 Jiwa	477.800.000	326 Jiwa	326.000.000	500 Jiwa	510.000.000	500 Jiwa	510.000.000	500 Jiwa	510.000.000	500 Jiwa	2.333.800.000		
					6 Penyaluran Beras Rastra	**Output :** Jumlah Pendistribusian Rastra **Outcome :** Terlaksananya distribusi penerima Rastra	-	-	-	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	140.000.000		
					7 Penyaluran Beras Raskin	**Output :** Distribusi Penerima Raskin **Outcome :** Tersedianya Jasa angkut Raskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					8 Penyediaan Rasda	**Output :** Jumlah PMKS yang menerima Rasda **Outcome :** Tersedianya Rasda bagi PMKS yang tidak menerima Rastra	-	352 KK	157.168.880	-	-	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	220.000.000	1 Tahun	240.000.000	5 Tahun	817.168.880		
					9 Operasional Rumah Singgah	**Output :** Jumlah Klien yang tertangani **Outcome :** Tersedianya Operasional dan Kebutuhan Klien Rumah Singgah	12 Bulan	-	-	35 Orang	437.179.400	12 Bulan	480.897.340	12 Bulan	528.987.074	12 Bulan	581.885.781	12 Bulan	2.028.949.595		
					10 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	**Output :** Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni **Outcome :** Jumlah Bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	216.000.000	12 Bulan	259.200.000	12 Bulan	311.040.000	12 Bulan	966.240.000		
					11 Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	**Output :** Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial **Outcome :** Jumlah PMKS yang	-	-	-	1 Tahun	89.650.000	1 Tahun	103.097.500	1 Tahun	123.717.000	1 Tahun	154.646.250	1 Tahun	471.110.750		
					12 Penanganan Korban Bencana	**Output :** Jumlah Bantuan untuk korban bencana **Outcome :** Tersedianya bantuan untuk korban bencana		1 Tahun	90.500.000	1 Tahun	92.197.900	1 Tahun	107.197.900	1 Tahun	122.197.900	1 Tahun	137.197.900	1 Tahun	549.291.600		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
				1.13.01.2	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase PMKS yang mengalami Perlindungan Sosial**	**93%**	**94%**	**2.180.000.000**	**95%**	**2.966.000.000**	**96%**	**3.109.200.000**	**97%**	**3.176.040.000**	**98%**	**3.255.498.000**	**98%**	**14.686.738.000**		
					1 Penanganan PMKS kronis dan mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi	**Output :** 1 Jumlah Bantuan kebutuhan dasar untuk lansia terlantar (tidak potensial/ bridden), Penyandang Disablitas Berat. **Outcome :** Tertanganinya lansia dan penyandang disabilitas berat terlantar yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi	578 orang	-	-	45 Orang	200.000.000	45 Orang	200.000.000	45 Orang	200.000.000	45 Orang	200.000.000	225 Orang	800.000.000		
					2 Fasilitasi Pelaksanaan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	**Output :** Jumlah Klien yang ditangani di RPTC **Outcome :** Penanganan Klien di	25 PMKS	25	180.000.000	25 PMKS	216.000.000	25 PMKS	259.200.000	25 PMKS	311.040.000	25 PMKS	373.248.000	25 PMKS	1.339.488.000		
					3 Kegiatan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan urusan perlindungan sosial	**Output :** Jumlah dokumen data dan informasi urusan perlindungan sosial **Outcome :** Data dan Informasi urusan perlindungan sosial	1 Tahun	1	-	1 Tahun	100.000.000,00	1 Tahun	100.000.000,00	1 Tahun	100.000.000,00	1 Tahun	100.000.000,00	5 Tahun	400.000.000		
					4 Kegiatan pengkoordinasian dan Pengendalian urusan identifikasi dan pengkajian kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat	**Output :** 1 Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-	50 KK	150.000.000	50 KK	150.000.000	50 KK	150.000.000	50 KK	150.000.000	50 KK	150.000.000	50 KK	750.000.000		
						2 Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan Motivasi dan Pendampingan Korban Bencana	-	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	500 Orang	750.000.000		
						3 Jumlah KK yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah korban bencana	-	50 KK	750.000.000	50 KK	750.000.000	50 KK	750.000.000	50 KK	750.000.000	50 KK	750.000.000	50 KK	3.750.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						Outcome : 1 Tumbuhnya kemandirian ekonomi bagi korban bencana 2 Terintegrasikannya proses pemulihan korban bencana sosial 3 Terehabilitasinya pemukiman korban bencana															
					6 Kegiatan pengoordinasian dan pengendalian urusan penyaluran/pendistribusian bantuan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat	**Output :** 1 Pemetaan dan identifikasi korban bencana serta assasment 2 Distribusi bantuan sembako, pakaian, peralatan dapur dan kebutuhan dasar lainnya **Outcome :** 1 Tersedianya data dan kebutuhan korban bencana 2 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dalam masa tanggap darurat	-	1500 Orang	50.000.000 1500 Orang	1500 Orang	50.000.000 1500 Orang	1500 Orang	50.000.000 1500 Orang	1500 Orang	50.000.000 1500 Orang	1500 Orang	50.000.000 1500 Orang	7500 Orang	250.000.000 7500 Orang		
					7 Kegiatan pengkoordinasian dan pengendalian urusan pemberdayaan Taruna Siaga	**Output :** 1 Jumlah anggota tagana dan pembina tagana yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, Sarana Prasarana (Sewa Sekretariat, Perlengkapan Kerja, Insentif dan Kendaraan Operasional) **Outcome :** 1 Tagana yang memiliki keterampilan 2 Tersedianya sarana prasarana penunjang	-	30	300.000.000	30 Orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	30 Orang	1.500.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					8 Kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana	**Output :** 1 Tersedianya Peta Mitigasi Bencana Alam dan Bencana Sosial 2 Tersedianya derektori mitra kerja dalam penanganan bencana **Outcome :** 1 Tersedianya data mitigasi dalam penanganan bencana alam dan bencana sosial 2 Tersedianya mitra dalam jejaring kerja untuk penanganan bencana alam dan bencana sosial	-	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	500.000.000		
					9 Kegiatan pengoordinasian dan pengendalian urusan penggalian sistem sumber bantuan sosial di masyarakat	**Output :** 1 Sosialisasi bantuan sosial 2 Verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial **Outcome :** 1 Tersosialisasinya mekanisme dan regulasi bansos serta MoU dengan sistem sumber 2 Terseleksinya calon penerima bantuan sosial sesuai regulasi	-	1 Kegiatan 1 Kegiata	100.000.000 100.000.000	1 Kegiatan 1 Kegiata	100.000.000 100.000.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	5 Kegiatan 5 Kegiatan	500.000.000 500.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					10 Kegiatan pengoordinasian dan pengendalian urusan Pengumpulan sumbangan Uang atau Barang (PUB)	**Output :** 1 Sosialisasi Pengumpulan uang dan barang (PUB) 2 Tersedinya direktori, pelaporan,stake holder yang melakukan PUB **Outcome :** 1 Tersosialisasinya mekanisme dan regulasi PUB serta MoU dengan sistem sumber 2 Tersedinya data base, pelaporan stake holder yang melakukan PUB	-	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100.000.000 100.000.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	500.000.000 500.000.000		
					11 Kegiatan pengoordinasian dan Pengendalian urusan seleksi, bimtek, peningkatan kapasitas dan peran Penyidik Pegawai Negeri	**Output :** 1 Seleksi dan kapacity building bagi PPNS **Outcome :** 1 Meningkatnya kapasitas dan peran PPNS	-	500 Jiwa	50.000.000	500 Jiwa	500.000.000	500 Jiwa	500.000.000	500 Jiwa	500.000.000	500 Jiwa	500.000.000	2500 Jiwa	2.050.000.000		
					12 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga	**Output :** Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbina **Outcome :** PMKS yang mendapatkan perlindungan &	-	-	-	-	-	2853 KPM	100.000.000	2853 KPM	115.000.000	2853 KPM	132.250.000	2853 KPM	347.250.000		
					13 Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pencegahan Bencana Sosial	**Output :** Jumlah peserta sosialisasi **Outcome :** Pemahaman terhadap Bencana Sosial	-	-	-	150 peserta sosialisasi	115.000.000	150 peserta sosialisasi	125.000.000	150 peserta sosialisasi	140.000.000	150 peserta sosialisasi	155.000.000	150 peserta sosialisasi	170.000.000		
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya		**20%**	**20%**	**495.610.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20%**	**495.610.000**		
					1 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	**Output :** Jumlah Pendamping KUBE dan TKSK dalam Pendampingan 200 KUBE (2.000 KK) **Outcome :** Keberfungsian Sosial Keluarga Fakir Miskin	15 Pendamping dan 3 TKSK	15 Pendamping dan 3 TKSK	232.650.000				-	-	-	-	-	15 Pendamping dan 3 TKSK	232.650.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					2 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- RTLH)	**Output :** Bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat **Outcome :** Tersedianya Rumah Tidak Layak Huni	-	1 Paket	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	30.000.000		
					3 Sewa dan Operasional Rumah Singgah	**Output :** Tersedianya Operasional dan Kebutuhan Klien **Outcome :** Terpenuhinya Operasional dan Kebutuhan Klien Rumah Singgah		1 Rumah Singga	232.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Rumah Singgah	232.960.000		
				1.13.01.1	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Prosentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS**	**88%**	**90%**	**15.097.000.000**	**93%**	**16.320.850.000**	**95%**	**17.880.765.000**	**98%**	**18.914.268.250**	**100%**	**19.702.101.166**	**100%**	**87.914.984.416**		
					1 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Pesisir	**Output :** 1 Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan motivasi/capacity	50 KK	50 KK	335.000.000	50 KK	351.750.000	50 KK	368.500.000	50 KK	385.250.000	50 KK	402.000.000	250 KK	1.842.500.000		
						2 Jumlah tenaga pendamping untuk bimbingan/pembinaan lingkungan sosial Komunitas Masyarakat Pesisir	2 Orang	2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		10 Orang			
						3 Jumlah penerima bantuan UEP	50 KK	50 KK		50 KK		50 KK		50 KK		50 KK		250 KK			
						Outcome : 1 Tersiapkannya rencana pemberdayaan dan kondisi sosial yang terukur dan sistematis															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)												Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						2 Mandirinya SDM Komunitas Masyarakat Pesisir															
						3 Terbina dan mandirinya lingkungan sosial Komunitas Masyarakat Pesisir															
						4 Teradvokasinya dan perlindungan sosial Komunitas Masyarakat Pesisir															
						5 Terfasilitasinya kebutuhan dasar Komunitas Masyarakat Pesisir															
					2 Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin	**Output :**															
						1 Jumlah peserta sosialisasi di kelurahan-	-	450 Orang	1.302.000.000	450 Orang	1.367.100.000	450 Orang	1.432.200.000	450 Orang	1.497.300.000	450 Orang	1.562.400.000	2.250 Orang	7.161.000.000		
						2 Jumlah KK fakir miskin yang menjadi peserta bimbingan motivasi/capacity builting/pelatihan keterampilan		250 KK		250 KK		250 KK		250 KK		250 KK		750 KK			
						3 Jumlah KK fakir miskin yang menerima bantuan UEP - KUBE		250 KK		250 KK		250 KK		250 KK		250 KK		750 KK			
						4 Jumlah tenaga pendamping untuk bimbingan/pembinaan lingkungan sosial		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang		15 Orang			
						Outcome :															
						1 Terpenuhinya kebutuhan pengenalan lokasi dan kebutuhan															
						2 Tersosialisasikannya Program															
						3 Fakir miskin yang memiliki keterampilan															
						4 Terfasilitasinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin															
						5 Terdampingi Kelompok Sasaran - KUBE (Pengembangan dan Penumbuhan)															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					3 Pemberdayaan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	**Output :**														
						1 Jumlah WRSE yang menjadi peserta bimbingan motivasi/capacity	-	200 Orang	954.000.000	200 Orang	1.001.700.000	200 Orang	1.049.400.000	200 Orang	1.097.100.000	200 Orang	1.144.800.000	1000 Orang	5.247.000.000		
						2 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi		450 Orang		450 Orang		450 Orang		450 Orang		450 Orang		2.250 Orang			
						3 Jumlah tenaga pendamping untuk bimbingan/pembinaan lingkungan sosial WRSE		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		5 Orang		25 Orang			
						4 Jumlah WRSE yang mendapatkan bantuan UEP		200		200		200		200		200		1000 Orang			
						Outcome :															
						1 Teridentifikasi dan terseleksinya calon penerima manfaat program															
						2 WRSE yang memiliki keterampilan															
						3 Terpahaminya mengenai Konsep Kelembagaan keluarga															
						4 Terdampingi WRSE															
					4 Pemberdayaan Sosial Pemulung	**Output :**															
						1 Jumlah pemulung yang menjadi peserta bimbingan motivasi/capacity building/pelatihan keterampilan	-	32 KK	150.800.000	32 KK	158.340.000	32 KK	166.257.000	32 KK	174.569.850	32 KK	183.298.343	160 KK	833.265.193		
						2 Jumlah pemulung yang mendapatan bantuan UEP		32 KK		32 KK		32 KK		32 KK		32 KK		160 KK			
						3 Jumlah tenaga pendamping untuk bimbingan/pembinaan lingkungan sosial pemulung		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		5 Orang			
						Outcome :															
						1 Terdatanya jumlah dan gambaran pemulung															
						2 Pemulung yang memiliki keterampilan															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						3 Terfasilitasinya kebutuhan dasar pemulung															
						4 Terdampinginya pemulung															
					5 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Karang Taruna	**Output :**															
						1 Jumlah pengurus Karang Taruna yang menjadi peserta bimbingan motivasi/Capacity Building/pelatihan keterampilan	-	48 Orang	1.290.000.000	48 Orang	1.354.500.000	48 Orang	1.422.225.000	48 Orang	1.493.336.250	48 Orang	1.568.003.063	240 Orang	7.128.064.313		
						2 Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan bantuan kelengkapan kantor, biaya operasional organisasi dan kegiatan UEP		16 Karang Taruna		16 Karang Taruna		16 Karang Taruna		16 Karang Taruna		16 Karang Taruna		16 Karang Taruna			
						3 Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan penilaian dan penghargaan		4 Karang Taruna		4 Karang Taruna		4 Karang Taruna		4 Karang Taruna		4 Karang Taruna		4 Karang Taruna			
						4 Jumlah peserta rapat kerja Karang Taruna (Kota, Provinsi & Pusat)		82 Orang		82 Orang		82 Orang		82 Orang		82 Orang		410 Orang			
						Outcome :															
						1 Karang Taruna yang memiliki keterampilan															
						2 Terfasilitasinya sarana dan prasarana Karang Taruna															
						3 Terfasilitasinya kebutuhan dasar anggota Karang Taruna															
						4 Terpilihnya Karang Taruna yang berprestasi															
						5 Terfasilitasinya kebutuhan operasional Karang Taruna															
						6 Terlaksananya Rakerda Tk. I & II serta Nasional															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					6 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	**Output :**														
						1 Jumlah pengurus LK3 yang menjadi peserta bimbingan motivasi/capacity building/pelatihan keterampilan	-	15 Orang	1.785.000.000	15 Orang	1.874.250.000	15 Orang	1.967.962.500	15 Orang	2.066.360.625	15 Orang	2.169.678.656	15 Orang	9.863.251.781		
						2 Jumlah LK3 yang mendapatkan bantuan kelengkapan kantor, biaya operasional dan kegiatan UEP		1 LK3		1 LK3		1 LK3		1 LK3		1 LK3		1 LK3			
						3 Jumlah peserta rapat kerja (Kota, Provinsi dan Pusat)		25 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		65 Orang			
						4 Jumlah klien penerima bantuan stimulan		500 Jiwa		500 Jiwa		500 Jiwa		500 Jiwa		500 Jiwa		2.500 Jiwa			
						Outcome :															
						1 Pengurus LK3 yang memiliki keterampilan															
						2 Terfasilitasinya Sarana Prasarana LK3															
						3 Teroptimalisasinya potensi sumberdaya dan terealisasinya dukungan operasional LK3															
						4 Terlaksananya Rakerda Tk.I & II serta Nasional															
						5 Terfasilitasinya kebutuhan dasar klien															
						6 Terlaporkannya hasil monev															
					7 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial PSM	**Output :**															
						1 Jumlah PSM yang menjadi peserta bimbingan motivasi/capacity builting/pelatihan keterampilan dan bantuan biaya operasional	-	79 PSM	811.800.000	79 PSM	852.390.000	79 PSM	895.009.500	79 PSM	939.759.975	79 PSM	986.747.974	79 PSM	4.485.707.449		
						2 Jumlah sekretariat PSM yang mendapatkan bantuan kelengkapan kantor		15 Sekretariat		15 Sekretariat		15 Sekretariat		15 Sekretariat		15 Sekretariat		15 Sekretariat			
						3 Jumlah PSM yang mendapatkan penghargaan		4 PSM		4 PSM		4 PSM		4 PSM		4 PSM		4 PSM			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						4 Jumlah PSM yang mengikuti Rapat Kerja Daerah dan Nasional		87 PSM		87 PSM		87 PSM		87 PSM		87 PSM		87 PSM			
						Outcome :															
						1 Pengurus PSM yang memiliki keterampilan															
						2 Terfasilitasinya Sarana Prasarana PSM															
						3 Terpilihnya PSM Yang Berprestasi															
						4 Teroptimalisasinya potensi sumberdaya dan terealisasinya dukungan operasional PSM															
						5 Terlaksananya Rakerda Tk.I & II serta Nasional															
					8 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	**Output :**																
						1 Jumlah WKSBM yang menjadi peserta dan mendapatkan bantuan bimbingan motivasi/capacity builting/pelatihan keterampilan, kelengkapan kantor, biaya operasional	-	15 WKSBM	792.600.000	15 WKSBM	832.230.000	15 WKSBM	873.841.500	15 WKSBM	917.533.575	15 WKSBM	963.410.254	15 WKSBM	4.379.615.329		
						2 Jumlah WKSBM yang mendapatkan Penghargaan WKSBM berprestasi		4 WKSBM		4 WKSBM		4 WKSBM		4 WKSBM		4 WKSBM		4 WKSBM			
						3 Jumlah personil WKSBM yang mengikuti Raker Kota, Provinsi dan Nasional		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		75 Orang		375 Orang			
						Outcome :															
						1 Pengurus WKSBM yang memiliki keterampilan															
						2 Terfasilitasinya Sarana Prasarana WKSBM															
						3 Terfasilitasinya kebutuhan operasional WKSBM															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						4 Terpilihnya PSM Yang Berprestasi															
						5 Terfasilitasinya kebutuhan dasar personil WKSBM															
						6 Terlaksananya Rakerda Tk.I & II serta Nasional															
					9 Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesejahteraan Sosial	**Output :**															
						1 Jumlah pengurus (Orsos, LKS dan LSM) yang menjadi peserta bimbingan motivasi/capacity building/pelatihan keterampilan	-	30 Orang	756.000.000	30 Orang	793.800.000	30 Orang	833.490.000	30 Orang	875.164.500	30 Orang	918.922.725	30 Orang	4.177.377.225		
						2 Jumlah Orsos, LKS dan LSM yang mendapatkan bantuan kelengkapan kantor, biaya operasional dan kegiatan UEP		10 Orsos/ LKS		10 Orsos/ LKS		10 Orsos/ LKS		10 Orsos/ LKS		10 Orsos/ LKS		10 Orsos/LKS			
						3 Jumlah Orsos, LKS dan LSM yang mendapatkan penghargaan		4 Orsos/ LKS/LSM		4 Orsos/ LKS/LSM		4 Orsos/ LKS/LSM		4 Orsos/ LKS/LSM		4 Orsos/ LKS/LSM		4 Orsos/LKS/LSM			
						4 Jumlah pengurus yang mengikuti Raker daerah dan nasional		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang			
						Outcome :															
						1 Pengurus Orsos-LKS yang memiliki keterampilan															
						2 Terfasilitasinya Sarana Prasarana Orsos- LKS															
						3 Terfasilitasinya kebutuhan operasional Orsos - LKS															
						4 Terpilihnya Orsos - LKS Yang															
						5 Terfasilitasinya kebutuhan dasar personil Orsos - LKS															
						6 Terlaksananya Rakerda Tk.I & II serta Nasional															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					10 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	**Output :**														
						1 Jumlah TKSK yang menjadi peserta bimbingan motivasi/capacity building/pelatihan keterampilan dan mendapatkan bantuan kelengkapan kantor serta dana	-	19 TKSK	419.800.000	19 TKSK	440.790.000	19 TKSK	462.829.500	19 TKSK	485.970.975	19 TKSK	510.269.524	19 TKSK	2.319.659.999		
						2 Jumlah TKSK yang mendapatkan penghargaan		4 TKSK		4 TKSK		4 TKSK		4 TKSK		4 TKSK		4 TKSK			
						3 Jumlah TKSK yang mengikuti kegiatan Raker daerah TK.I dan nasional		8 TKSK		8 TKSK		8 TKSK		8 TKSK		8 TKSK		8 TKSK			
						Outcome :															
						1 Pengurus TKSK yang memiliki keterampilan															
						2 Teroptimalisasinya potensi sumberdaya dan terealisasinya dukungan operasional TKSK															
						3 Terfasilitasinya Sarana Prasarana TKSK															
						4 Terpilihnya TKSK Yang Berprestasi															
						5 Terlaksananya Raker Daerah Tk.I serta Nasional															
					11 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pekerja Sosial Profesional	**Output :**															
						1 Jumlah Peksos yang menjadi peserta bimbingan motivasi/capacity building/pelatihan keterampilan dan mendapatkan bantuan biaya operasional serta kelengkapan kantor	-	79 Peksos	1.155.000.000	79 Peksos	1.212.750.000	79 Peksos	1.273.387.500	79 Peksos	1.337.056.875	79 Peksos	1.403.909.719	79 Peksos	6.382.104.094		
						2 Jumlah organisasi yang mendapatkan dukungan operasional		1 Organisasi		1 Organisasi		1 Organisasi		1 Organisasi		1 Organisasi		1 Organisasi			
						3 Jumlah Peksos yang mendapatkan penghargaan		4 Peksos		4 Peksos		4 Peksos		4 Peksos		4 Peksos		4 Peksos			
						4 Jumlah Peksos yang mengikuti Rapat Kerja Daerah (Tk.II & I) dan Nasional		87 Peksos		87 Peksos		87 Peksos		87 Peksos		87 Peksos		87 Peksos			
						5 Jumlah Penyuluh yang disertifikasi		15 Peksos		15 Peksos		15 Peksos		15 Peksos		15 Peksos		15 Peksos			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						Outcome : 1 Pengurus Peksos Profesional yang memiliki keterampilan 2 Terbentuknya Organisasi Wadah Peksos Profesional Kota Bontang 3 Teroptimalisasinya potensi sumberdaya dan terealisasinya dukungan operasional Peksos Profesional 4 Terfasilitasinya Sarana Prasarana Peksos Profesional 5 Terpilihnya Peksos Profesional Yang Berprestasi 6 Terlaksananya Raker Daerah Tk.I & TK.II serta Nasional 7 Tersertifikasinya Peksos Profesional																	
					12 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Penyuluh Sosial Profesional	**Output :** 1 Jumlah Penyuluh yang menjadi peserta bimbingan motivasi/capacity building/pelatihan keterampilan dan yang mendapatkan dukungan biaya operasional serta kelengkapan kantor	-	24 Penyuluh	990.000.000	24 Penyuluh	1.039.500.000	24 Penyuluh	1.091.475.000	24 Penyuluh	1.146.048.750	24 Penyuluh	1.203.351.188	24 Penyuluh	5.470.374.938		
						2 Jumlah organisasi yang mendapatkan dukungan operasional		1 Organisasi		1 Organisasi		1 Organisasi		1 Organisasi		1 Organisasi		1 Organisasi			
						3 Jumlah Penyuluh yang mendapatkan penghargaan		4 Penyuluh		4 Penyuluh		4 Penyuluh		4 Penyuluh		4 Penyuluh		4 Penyuluh			
						4 Jumlah Penyuluh yang mengikuti Rapat Kerja Daerah (Tk.II & I) dan Nasional		32 Penyuluh		32 Penyuluh		32 Penyuluh		32 Penyuluh		32 Penyuluh		32 Penyuluh			
						5 Jumlah penyuluh yang disertifikasi		5 Penyul		5 Penyul		5 Penyul		5 Penyul		5 Penyul		5 Penyulu			
						Outcome : 1 Pengurus Penyuluh Sosial Profesional yang memiliki keterampilan															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						2 Terbentuknya Organisasi Wadah Penyuluh Sosial Profesional Kota Bontang															
						3 Teroptimalisasinya potensi sumberdaya dan terealisasinya dukungan operasional Penyuluh Sosial Profesional															
						4 Terfasilitasinya Sarana Prasarana Penyuluh Sosial Profesional															
						5 Terpilihnya Penyuluh Sosial Profesional Yang Berprestasi															
						6 Terlaksananya Raker Daerah Tk.I & TK.II serta Nasional															
						7 Tersertifikasinya Penyuluh Sosial Profesional															
					13 Pemberdayaan Forum Coorparate Social Responsibility (CSR) Kesejahteraan Sosial (CSR-Kessos)	**Output :**															
						1 Jumlah perusahaan yang mengumpulkan dokumen data dan laporan terkait realisasi dan potensi CSR Kesos	-	10 Perusahaan	715.000.000	10 Perusahaan	750.750.000	10 Perusahaan	788.287.500	10 Perusahaan	827.701.875	10 Perusahaan	869.086.969	10 Perusahaan	3.950.826.344		
						2 Jumlah peserta dari perwakilan perusahaan yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembentukan Forum CSR Kesos serta bimbingan teknis/capacity building		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang			
						3 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Temu Forum CSR Kesos Daerah dan Nasional		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang			
						4 Jumlah forum yang mendapatkan bantuan biaya operasional forum CSR Kesos		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan			
						5 Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan terkait dengan implementasi CSR Kesos		4 Perusahaan		4 Perusahaan		4 Perusahaan		4 Perusahaan		4 Perusahaan		4 Perusahaan			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						Outcome : 1 Terdatanya jumlah Sektor Dunia Usaha yang merupakan Potensi Sumber 2 Tersosialisasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor dan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha 3 Terlaksananya Temu Forum CSR Kesos Tk.I & II serta Nasional 4 Pengurus Forum CSR Kesos yang memiliki wawasan dan keterampilan 5 Terfasilitasinya kebutuhan operasional forum CSR Kesos 6 Terpilihnya Dunia Usaha/Perusahan Yang Berprestasi															
					14 Pembinaan dan Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	**Output :** 1 Jumlah peserta kegiatan sosialisasi	-	60 Orang	3.430.000.000	60 Orang	3.601.500.000	60 Orang	3.781.575.000	60 Orang	3.970.653.750	60 Orang	4.169.186.438	60 Orang	18.952.915.188		
						2 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan cerdas cermat antar SMA kota bontang terkait dengan wawasan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang			
						3 Jumlah peserta yang mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan dan HKSN		500 Orang		500 Orang		500 Orang		500 Orang		500 Orang		500 Orang			
						4 Jumlah tenaga pendamping		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang			
						5 Jumlah Pembangunan taman makam dan objek studi serta wisata pahlawan dan pahlawan nasional		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			
						6 Jumlah penerima bantuan UEP dan sembako, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sarana lingkungan veteran/piveri		12 Veteran/Piveri		12 Veteran/Piveri		12 Veteran/Piveri		12 Veteran/Piveri		12 Veteran/Piveri		12 Veteran/ Piveri			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						Outcome : 1 Teridentifikasi dan terdokumentasikannya calon sasaran program 2 Tersebarluaskannya Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial 3 Terperingatinya Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial 4 Teroptimalisasinya potensi sumberdaya dan terealisasinya dukungan operasional 5 Tersusunnya Standarisasi Makam Pahlawan dan Pahlawan Nasional 6 Terehabilitasinya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional 7 Meningkatnya fungsi Taman Makam Pahlawan dan Pahlawan Nasional Menjadi Objek Studi dan Wisata 8 Teridentifikasi dan Terseleksinya calon penerima penghargaan 9 Terehabilitasinya Rumah dan Sarana Lingkungan Para Perintis Kemerdekaan, Veteran dan Keluarga															
					15 Penerbitan izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)	**Output :** 1 Jumlah peserta kegiatan sosialisasi/seminar/ diskursus	-	60 Orang	210.000.000	60 Orang	220.500.000	60 Orang	231.525.000	60 Orang	243.101.250	60 Orang	255.256.313	60 Orang	1.160.382.563		
						2 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan orsos		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang			
						3 Jumlah peserta yang mengikuti diklat PPNS PUB		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						Outcome : 1 Tersosialisasikan dan Terpublikasikannya Pencegahan Penipuan PUB 2 Terverifikasinya Dokumen Pemohon Izin PUB dan Terprosesnya SK Izin PUB 3 Terawasinya Pelaksanaan PUB 4 Meningkatnya Kapasitas Orsos 5 Meningkatnya Kapasitas dan Peran PPNS PUB														
					16 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	**Output :** Jumlah Pendamping KUBE dan TKSK dalam pendampingan 252 KUBE 2.520 KK)	15 Pendamping dan 3 TKSK	-	-	15 Pendamping dan 3 TKSK	285.000.000	15 Pendamping dan 3 TKSK	342.000.000	15 Pendamping dan 3 TKSK	410.400.000	15 Pendamping dan 3 TKSK	492.480.000	15 Pendamping dan 3 TKSK	1.529.880.000		
						Outcome : Penanganan Usaha KUBE PMKS													1.762.530.000		
					17 Verivali Data Terpadu Program	**Output :** Jumlah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang di Verivali	-	-	-	5725 KPM	184.000.000	1 Tahun	220.800.000	1 Tahun	264.960.000	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	669.760.000		
						Outcome : Data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Tepat Sasaran															
					18 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat	**Output :** Jumlah BPNT yang diterima Keluarga Penerima Manfaat	-	-	-	-	-	500 KPM	680.000.000	500 KPM	782.000.000	500 KPM	899.300.000	500 KPM	2.361.300.000		
						Outcome : Distribusi BPNT di Kota Bontang															
					PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		**1 Tahun**	**1**	**69.500.000**	**1 Tahun**	**70.925.000**	**1 Tahun**	**95.000.000**	**1 Tahun**	**115.000.000**	**1 Tahun**	**135.000.000**	**1 Tahun**	**485.425.000**		
					1 Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	**Output :** Jumlah Veteran/ Piveri Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar dan Peringatan Hari Pahlawan	12 Orang	12 Orang	69.500.000	12 Orang	70.925.000	12 Orang	95.000.000	12 Orang	115.000.000	12 Orang	135.000.000	12 Orang	485.425.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						Outcome : Tersedianya bantuan Kebutuhan Dasar untuk Veteran/ Piveri dan Peringatan Hari Pahlawan															
Meningkatnya kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan pelindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarustamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	**a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)** **b. Score Kota Layak Anak**	**1 Meningkatnya Peran Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak**	**1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah** **2 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta** **3 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan** **4 Ratio KDRT**		**Prgram Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**Meningkatnya Keserasian Terhadap Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan**	**70%**	**90%**	**176.835.000**	**100%**	**431.715.200**	**100%**	**520.454.460**	**100%**	**660.537.874**	**100%**	**879.762.135**	**100%**	**2.669.304.669**		
					1 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	**Output :** Jumlah seminar kualitas hidup **Outcome :** Seminar kualitas hidup perempuan	500 orang (anggota GOW, TP-PKK, MUSPIDA, SKPD)	700 orang anggota GOW, TP-PKK, Muspida SKPD	68.600.000	1 Tahun	75.460.000	1 Tahun	83.006.000	1 Tahun	91.306.600	1 Tahun	100.437.260	1 Tahun	418.809.860		
					2 Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan peran perempuan	**Output :** Jumlah peserta seminar dan peserta deteksi dini kanker rahim dan payudara **Outcome :** Seminar dan peserta deteksi dini kanker rahim dan payudara	100 orang (anggota GOW, TP-PKK, MUSPIDA, SKPD)	800 orang anggota GOW, TP-PKK, Muspida	72.990.000	1 Tahun	80.289.000	1 Tahun	88.317.900	1 Tahun	97.149.690	1 Tahun	106.864.659	1 Tahun	445.611.249		
					3 Satuan Gugus tugas Kota Layak Anak	**Output :** Jumlah peserta pelatihan forum peduli ABK, peserta pelatihan PUHA, kegiatan forum anak, peringatan hari anak nasional **Outcome :** Pencapaian indikator 5 Klaster hak anak , kegiatan forum anak dan peringatan hari anak nasional	60 peserta PUHA, 30 peserta forum anak, 250 peserta peringatan hari anak nasional	35 Peserta terlatih KHA (Konvensi Hak Anak)	35.245.000	85 Orang terlatih KHA & 40 Orang terlatih sebagai pendamping Anak disabilitas Korban Kekerasan	219.711.200	1 Tahun	285.624.560	1 Tahun	399.874.384	1 Tahun	599.811.576	1 Tahun	1.540.266.720		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					4 Pembinaan AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)	**Output :** 15 Kategori AMPK yang dilayani **Outcome :** Pemenuhan Kluster 5 KLA Perlindungan Khusus	-	-	-	4 Kategori AMPK	20.000.000	4 Kategori AMPK	20.000.000	4 Kategori AMPK	20.000.000	3 Kategori AMPK	10.000.000	15 Kategori AMPK yang	70.000.000		
					5 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perlindungan Anak	**Output :** Pembinaan dan Pembentukan PATBM dan APSAI **Outcome :** Pencapaian sebagaian cluster penguatan Kelembagaan KLA	-	-	-	100%	36.255.000	100%	43.506.000	100%	52.207.200	100%	62.648.640	100%	194.616.840		
					Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	**Menguatnya Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak**	-	**100%**	**302.166.000**	**100%**	**420.617.100**	**100%**	**474.602.060**	**100%**	**535.774.004**	**100%**	**605.119.903**	**100%**	**2.338.279.066**		
					1 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	**Output :** Jumlah pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dan jumlah lokasi sosialisasi **Outcome :** Pendampingan perempuan dan korban kekerasan dan jumlah lokasi sosialisasi	400 kali pendampingan dan sosialisasi di 16 lokasi	400 kali pendampingan dan sosialisasi di 20	164.605.000	230 kali pendampingan dan sosialisasi di 20 lokasi	238.465.000	324 Pendampingan dan sosialisasi di 22	274.234.750	291 Pendampingan dan sosialisasi di 24	315.369.963	261 Pendampingan dan sosialisasi di 26	362.675.457	1636 Pendampingan dan sosialisasi di 112 Lokasi	1.355.350.169		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					2 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	**Output :** Jumlah dokumen data pemberdayaan **Outcome :** Data pemberdayaan perempuan	1 dokumen	1 Dokumen	12.325.000	1 Dokumen	13.557.500	1 Dokumen	14.913.250	1 Dokumen	16.404.575	1 Dokumen	18.045.033	5 Dokumen	75.245.358		
					3 Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	**Output :** Jumlah Lembaga/ Organisasi Pemerhati Perempuan dan Anak yang mendapat pembinaan dan penguatan kapasitas **Outcome :** Lembaga yang mendukung pengarustamaan gender dan anak	-	-	-	29 OPD	30.835.000	29 OPD	33.918.500	29 OPD	37.310.350	29 OPD	41.041.385	5 Tahun	143.105.235		
					4 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	**Output :** Jumlah peserta rakor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se-Provinsi Kaltim **Outcome :** Peran perempuan sebagai pihak pengambil keputusan dalam pembangunan	10 orang	100 Orang peserta rakor PP dan anak se-Provinsi	98.366.000	1 Tahun	108.202.600	1 Tahun	119.022.860	1 Tahun	130.925.146	1 Tahun	144.017.661	5 Tahun	600.534.267		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	**Output :** Tersedianya data pemberdayaan perempuan dan anak **Outcome :** Data monev pemberdayaan perempuan dan anak	1	1 Dokumen	8.600.000	1 Dokumen	9.460.000	1 Dokumen	10.406.000	1 Dokumen	11.446.600	1 Dokumen	12.591.260	5 Dokumen	52.503.860		
					6 Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender	**Output :** Jumlah lembaga yang berbasis gender **Outcome :** Lembaga yang berbasis gender	40 orang dari TP-PKK se-Kota Bontang	100 orang peserta dari PARPOL,organisasi Kemasyarakatan Peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	18.270.000	18.02 orang peserta dari PARPOL,organisasi Kemasyarakatan Peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	20.097.000	19.82 orang peserta dari PARPOL,organisasi Kemasyarakatan Peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	22.106.700	21.8 orang peserta dari PARPOL,organisasi Kemasyarakatan Peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	24.317.370	23.98 orang peserta dari PARPOL,organisasi Kemasyarakatan Peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	26.749.107	6500 orang peserta dari PARPOL, organisasi Kemasyarakatan Peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	111.540.177		
					7 Pengembangan Sistem Informasi Data Gender dan Anak	**Output :** Tersedianya Jumlah jaringan SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) **Outcome :** Jumlah Jaringan SIGA yang tersedia	-	-	-	4 OPD	141.000.000	5 OPD	162.150.000	5 OPD	186.472.500	5 OPD	214.443.375	3 Kecamatan, 15 keluraha n, 1 OPD	704.065.875		
					Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	**Jumlah SKPD melaksanakan Program/ Kegiatan Responsif Gender**	**20%**	**50%**	**359.870.000**	**10%**	**458.039.000**	**15%**	**513.842.900**	**20%**	**577.227.190**	**25%**	**649.349.910**	**25%**	**2.558.329.000**		
					1 Pembinaan Organisasi Perempuan	**Output :** Jumlah organisasi perempuan di Kota Bontang yang dibina **Outcome :** Pembinaan organisasi perempuan di Kota Bontang	50 Orang	100 orang dari organisasi perempuan	17.400.000	1 Tahun	19.140.000	1 Tahun	21.054.000	1 Tahun	23.159.400	1 Tahun	25.475.340	5 Tahun	106.228.740		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					2 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	**Output :** Jumlah Kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender **Outcome :** Kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender	20 Orang	1 Tahun	78.600.000	1 Tahun	86.460.000	1 Tahun	95.106.000	1 Tahun	104.616.600	1 Tahun	115.078.260	5 Tahun	479.860.860		
					3 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	**Output :** Jumlah kelompok desa prima **Outcome :** Kelompok ekonomi yang dibina	2	15 Kelurahan	117.075.000	15 Kelurahan	128.782.500	15 Kelurahan	141.660.750	15 Kelurahan	155.826.825	15 Kelurahan	171.409.508	15 Kelurahan	714.754.583		
					4 Pelaksanaan, Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian P2WKSS	**Output :** Jumlah Pengurus TP-PKK yang memenuhi indikator program terpadu P2WKSS **Outcome :** Pengurus TP-PKK yang memenuhi indikator program terpadu P2WKSS	6	100 Orang untuk sosialisasi & 375 orang TP-PKK untuk pembinaan P2WKSS	50.575.000	100 Orang untuk sosialisasi & 375 orang TP-PKK untuk pembinaan P2WKSS	55.632.500	100 Orang untuk sosialisasi & 375 orang TP-PKK untuk pembinaan P2WKSS	61.195.750	100 Orang untuk sosialisasi & 375 orang TP-PKK untuk pembinaan P2WKSS	67.315.325	100 Orang untuk sosialisasi & 375 orang TP-PKK untuk pembinaan P2WKSS	74.046.858	100 Orang untuk sosialisasi & 375 orang TP-PKK untuk pembinaan P2WKSS	308.765.433		
					5 Peningkatan Kapasitas Anggota DWP	**Output :** Jumlah anggota DWP yang dibina **Outcome :** Peningkatan SDM anggota DWP	100 orang	100 orang	61.840.000	100 orang	68.024.000	100 orang	74.826.400	100 orang	82.309.040	100 orang	90.539.944	100 orang	377.539.384		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)												Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					6 Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	**Output :** Jumlah anggota GOW yang dibina **Outcome :** Peningkatan SDM anggota GOW	-	-	-	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	144.000.000	1 Tahun	172.800.000	1 Tahun	536.800.000		
					7 Workshop peningkatan peran perempuan dalam mengambil keputusan	**Output :** Jumlah peserta **Outcome :** Meningkatnya jumlah peran perempuan dalam pengambilan keputusan	-	100 Orang	34.380.000	100 Orang	75.000.000	100 Orang	90.000.000	100 Orang	115.000.000	100 Orang	140.000.000	100 Orang	454.380.000		
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	**Menurunkan Angka KDRT dan Anak**	**20%**	**60%**	**92.620.000**	**100%**	**431.832.000**	**100%**	**498.012.700**	**100%**	**575.261.095**	**100%**	**665.551.400**	**100%**	**2.263.277.195**		
					1 Sosialisasi dan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	**Output :** SDM tenaga terampil dan pencatatan kasus KDRT **Outcome :** Data kasus KDRT	100%	-	-	21,55%	35.000.000	23,70%	38.500.000	26,07%	42.350.000	28,68%	46.585.000	100%	162.435.000		
					2 Pelatihan SDM sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	**Output :** SDM tenaga terampil dan pencatatan kasus KDRT **Outcome :** Data kasus KDRT	-	-	-	20%	35.000.000	20%	38.500.000	20%	42.350.000	20%	46.585.000	80%	162.435.000		
					3 Pelatihan TOT SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	**Output :** Jumlah peserta **Outcome :** SDM yang memenuhi syarat untuk menjadi pendamping dalam memeberikan pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan	100	50 Orang tenaga pelatih	38.885.000	1 Tahun	42.773.500	1 Tahun	47.050.850	1 Tahun	51.755.935	1 Tahun	56.931.529	5 Tahun	237.396.814		
					4 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	**Output :** Jumlah peserta **Outcome :** Kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	100	35 Orang	21.650.000	1 Tahun	23.815.000	1 Tahun	26.196.500	1 Tahun	28.816.150	1 Tahun	31.697.765	5 Tahun	132.175.415		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					5 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	**Output :** Jumlah peserta pelatihan puskesmas dan rumah sakit yang menjadi tata laksana korban kekerasan **Outcome :** Puskesmas dan sekolah yang menjadi tata laksana korban kekerasan	100	1 Tahun	32.085.000	1 Tahun	35.293.500	1 Tahun	38.822.850	1 Tahun	42.705.135	1 Tahun	46.975.649	5 Tahun	195.882.134		
					6 Penyusunan Profil Gender dan Anak	**Output :** Tersedianya Profil Gender dan Anak **Outcome :** Profil Gender dan Anak	-	-	-	1 Dokumen	25.250.000	1 Dokumen	29.037.500	1 Dokumen	33.393.125	1 Dokumen	38.402.094	1 Dokumen	126.082.719		
					7 Seminar Peningkatan Kesadaran Gender dan Anak	**Output :** Jumlah Perempuan dan Anak yang mengikuti seminar **Outcome :** Meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan gender	-	-	-	230 Orang	34.700.000	230 Orang	39.905.000	230 Orang	45.890.750	230 Orang	52.774.363		173.270.113		
					8 Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang	**Output :** Jumlah DWP yang berperan **Outcome :** Meningkatnya kapasitas peran perempuan dalam mengambil keputusan	-	-	-	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	240.000.000	1 Tahun	288.000.000	1 Tahun	345.600.000	1 Tahun	1.073.600.000		
Meningkatnya Peran serta, Partisipasi dan Swadaya Masyarakat/Lembaga Secara Aktif Dalam Proses	**Indeks Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif**	**Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat/Lembaga Dalam Pembangunan**	**LPM Aktif** **PKK Aktif** **Posyandu Aktif** **Swadaya Masyarakat Terhadap Pembangunan Wilayah**		**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1.137.460.000**	**1 Tahun**	**1.195.706.000**	**1 Tahun**	**1.259.776.600**	**1 Tahun**	**1.330.254.260**	**1 Tahun**	**1.407.779.686**	**1 Tahun**	**6.330.976.546**		
					1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan dan Kelembagaan Masyarakat	**Output :** 1 Jumlah Pengurus LPM Yang Berhasil	-	38 Orang	582.460.000	38 Orang	640.706.000	38 Orang	704.776.600	38 Orang	775.254.260	38 Orang	852.779.686	190 Orang	3.555.976.546		
						2 Jumlah Kader Posyandu Yang Berhasil Dilatih **Outcome :** Meningkatnya Sumber Daya Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat	11 Posyandu (5 org pengurus)	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000	45 Orang	50.000.000	225 Orang	250.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)												Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					2 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan Lembaga Masyarakat	**Output :** 1 Jumlah Kader PKK Yang Berhasil Dilatih Umum	698 Org	270 Orang	135.000.000	270 Orang	135.000.000	270 Orang	135.000.000	270 Orang	135.000.000	270 Orang	135.000.000	270 Orang	675.000.000		
						2 Jumlah Kader PKK Yang Berhasil Dilatih Tentang Kader Khusus	35 Org	160 Orang	120.000.000	160 Orang	120.000.000	160 Orang	120.000.000	160 Orang	120.000.000	160 Orang	120.000.000	160 Orang	600.000.000		
						3 Jumlah Ketua RT, Sekretaris, Bendahara Yang Berhasil Dilatih	499 RT	150 Orang	250.000.000	150 Orang	250.000.000	150 Orang	250.000.000	150 Orang	250.000.000	150 Orang	250.000.000	750 Orang	1.250.000.000		
						Outcome : Meningkatnya Sumber Daya Masyarakat dan Keberdayaan Masyarakat															
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	**Persentase Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1.442.470.000**	**1 Tahun**	**1.347.000.000**	**1 Tahun**	**1.436.400.000**	**1 Tahun**	**1.597.320.000**	**1 Tahun**	**1.876.248.000**	**1 Tahun**	**7.699.438.000**		
					1 Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	**Output :** 1 Terbentuknya Kelompok Binaan LPM Kelurahan	15 Kelurahan	3 kel	300.000.000	3 kel	300.000.000	3 kel	300.000.000	3 kel	300.000.000	3 kel	300.000.000	15 kel	1.500.000.000		
						2 Terbentuknya Kelompok Binaan PKK Tingkat	3 kecamatan	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	1.500.000.000		
						3 Terbentuknya Kelompok Posyandu Berdasarkan Klasifikasi	3	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	1.500.000.000		
						Outcome : Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan															
					2 Pembinaan dan Pelatihan PKK (Sekretariat PKK)	**Output :** Pembinaan dan Pelatihan PKK **Outcome :** Terlaksananya Kegiatan Pelatihan PKK	-	1	542.470.000	1 Tahun	447.000.000	1 Tahun	536.400.000	1 Tahun	697.320.000	1 Tahun	976.248.000	1 Tahun	3.199.438.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	**Persentase Lembaga Masyarakat Yang Memiliki Kelompok Binaan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**900.000.000**	**1 Tahun**	**900.000.000**	**1 Tahun**	**900.000.000**	**1 Tahun**	**900.000.000**	**1 Tahun**	**900.000.000**	**1 Tahun**	**4.500.000.000**		
					1 Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Penyelenggaraan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	**Output :**															
						1 Terbentuknya Kelompok Binaan LPM Kelurahan	15 Kelurahan	3 Kel	300.000.000	3 Kel	300.000.000	3 Kel	300.000.000	3 Kel	300.000.000	3 Kel	300.000.000	15 Kel	1.500.000.000		
						2 Terbentuknya Kelompok Binaan PKK Tingkat ..	3 kecamatan	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	1.500.000.000		
						3 Terbentuknya Kelompok Posyandu Berdasarkan Klasifikasi	3 kecamatan	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	300.000.000	3 kec	1.500.000.000		
						Outcome : Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan															
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	**Prosentasi Partisipasi Masyarakat Meningkat**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**2.510.000.000**	**1 Tahun**	**2.960.000.000**	**1 Tahun**	**3.266.400.000**	**1 Tahun**	**3.441.480.000**	**1 Tahun**	**3.630.576.000**	**1 Tahun**	**15.808.456.000**		
					1 Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Urusan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	**Output :**															
						1 Terselenggaranya Partsipasi Masyarakat Melalui Kesetariatan LPM Tingkat Kota	Kota	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	375.000.000		
						2 Terselenggaranya Partsipasi Masyarakat Melalui Kesertariatan TP PKK Tingkat Kota	Kota	Kota	500.000.000	Kota	500.000.000	Kota	500.000.000	Kota	500.000.000	Kota	500.000.000	Kota	2.500.000.000		
						3 Tersedianya Data dan Informasi Melalui Pembuatan Sistem Aplikasi Informasi PKK	Kota	Kota	-	Kota	250.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	475.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)												Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						4 Terselenggaranya partsipasi mayarakat melalui kesertariatan Pokjanal Posyandu tingkat Kota	Kota	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	375.000.000		
						5 Terselenggaranya Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Masyarakat	Kota	Kota	1.000.000.000	Kota	1.000.000.000	Kota	1.000.000.000	Kota	1.000.000.000	Kota	1.000.000.000	Kota	5.000.000.000		
						6 Tersedianya Data dan Informasi Melalui Pembuatan Sistem Aplikasi Informasi Partisipasi Masyarakat RT	Kota	Kota	-	Kota	200.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	425.000.000		
						7 Terlaksananya Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Yang Bersinergi Dengan Pembangunan Daerah	Kota	Kota	150.000.000,00	Kota	150.000.000	Kota	150.000.000	Kota	150.000.000	Kota	150.000.000	Kota	750.000.000		
						Outcome : Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan															
					2 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Bimtek pada Lembaga Kemasyarakatan	**Output :**															
						1 Terselenggaranya Bimtek Pada LPM	Kota	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	75.000.000	Kota	375.000.000		
						2 Terselenggaranya Bimtek Pada PKK	3	Kota	150.000.000	Kota	150.000.000	Kota	150.000.000	Kota	150.000.000	Kota	150.000.000	Kota	750.000.000		
						3 Terselenggaranya Bimtek Pada Posyandu	Posyandu (52 unit)	55 org	60.000.000	Kota	60.000.000	Kota	60.000.000	Kota	60.000.000	Kota	60.000.000	260 Orang	300.000.000		
						4 Terselenggaranya Bimtek Pada Ketua RT dan Pengurus	15	3 Kel	250.000.000	3 kel	250.000.000	3 kel	250.000.000	3 kel	250.000.000	3 kel	250.000.000	3 kel	1.250.000.000		
						5 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Semangat Gotong Royong (BBGRM)	1 Kegiatan	1 Keg	175.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	175.000.000	1 Keg	175.000.000	5 Keg	875.000.000		
						Outcome : Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
					3 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	**Output :** Terdampinginya masarakat dalam pelaksanaan Produta Tingkat Kota **Outcome :** Terlaksananya Kegiatan Produta		-	-	-	-	100%	350.400.000	100%	420.480.000	100%	504.576.000	100%	1.275.456.000		
					4 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	**Output :** Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat **Outcome :** Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Kota	-	-	-	-	Kota	256.000.000	Kota	361.000.000	Kota	466.000.000	Kota	1.083.000.000		
					PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		**100%**	**100%**	**441.000.000**	**100%**	**292.000.000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**733.000.000**		
					1 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	**Output :** Terdampinginya masarakat dalam pelaksanaan Produta Tingkat Kota **Outcome :** Terlaksananya Kegiatan Produta	-	100%	290.000.000	100%	292.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	582.000.000 1.857.456.000		
					2 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	**Output :** Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan masvarakat **Outcome :** Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	-	60 Orang	151.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Orang	151.000.000		
					Pengembangan Ekonomi Masyarakat	**Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Binaan Kelembagaan Kelurahan**	**1 Tahun**	**1**	**200.000.000**	**1 Tahun**	**550.000.000**	**1 Tahun**	**250.000.000**	**1 Tahun**	**250.000.000**	**1 Tahun**	**250.000.000**	**1 Tahun**	**1.500.000.000**		
					1 Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	**Output :** Melakukan Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Binaan Kelembagaan Kelurahan	-	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	4 Keg	500.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Dibidang Ekonomi Kelembagaan Masyarakat														
					2 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	**Output :** Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Binaan Kelembagaan Kelurahan	-	3 Kel	100.000.000	3 Kel	100.000.000	3 Kel	100.000.000	3 Kel	100.000.000	3 Kel	100.000.000	15 Kel	500.000.000		
						Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Dibidang Ekonomi Kelembagaan															
					3 Fasilitasi aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan	**Output :** Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Pembuatan Aplikasi Sistem Unit Pengaduan Masyarakat)	-	Kota	-	Kota	350.000.000	Kota	50.000.000	Kota	50.000.000	Kota	50.000.000	Kota	500.000.000		
						Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Dibidang Ekonomi Kelembagaan															
					Peningkatan Pendayaagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	**Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pada Masyarakat**	**1 Tahun**	**1**	**450.000.000**	**1 Tahun**	**508.046.300**	**1 Tahun**	**519.655.560**	**1 Tahun**	**533.586.672**	**1 Tahun**	**550.304.006**	**1 Tahun**	**2.561.592.538**		
					1 Pelatihan/BIMTEK Penyebarluasan dan Penerapan TTG	**Output :** fasilitasi pos pelayanan teknologi (Posyantek) bagi kelembagaan masyarakat kelurahan	3	-	100.000.000	1 Kecamatan	100.000.000	1 Kecamatan	100.000.000	1 Kecamatan	100.000.000	1 Kecamatan	100.000.000	3 Kecamatan	500.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupah)										Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi / Keterangan
								Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
						Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi untuk Kesejahteraan Masvarakat														
					2 Fasilitasi dan Koordinasi Pemetaan Kebutuhan dan Kerjasama Teknologi	**Output :** Pendataan dan Pemetaan kebutuhan teknologi TTG Bagi Masyarakat	Kota	Kota	100.000.000	Kota	100.000.000	Kota	100.000.000	Kota	100.000.000	Kota	100.000.000	Kota	500.000.000		
						Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi untuk Kesejahteraan Masyarakat														
					3 Fasilitasi dan Koordinasi Gelar TTG	**Output :** Fasilitasi dan Koordinasi dalam acara lomba Gelar TTG, Prov dan Nasional	Kota	Kota	250.000.000	Kota	250.000.000	Kota	250.000.000	Kota	250.000.000	Kota	250.000.000	Kota	1.250.000.000		
						Outcome : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi untuk Kesejahteraan Masyarakat														
					4 Permasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	**Output :** Jumlah Kelompok Masyarakat TTG yang berhasil	3 Posyantek	-	-	3 Posyantek (3 Kecamatan)	58.046.300	3 Posyantek (3 Kecamatan)	69.655.560	3 Posyantek (3 Kecamatan)	83.586.672	3 Posyantek (3 Kecamatan)	100.304.006	3 Posyantek (3 Kecamatan)	311.592.538		
						Outcome : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat														
J U M L A H									**36.271.938.049**		**39.684.284.200**		**43.531.323.300**		**47.887.884.107**		**52.180.141.252**		**219.555.570.908**		

Bab VII
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2021

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD (2021)
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
URUSAN SOSIAL									
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	24,86	76,10	80,00	80,55	85,21	88,27	88,27
URUSAN PPPA									
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,35	12,43	15,00	15,25	15,50	16,00	16,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	33,91	87,57	85,00	84,75	84,50	84,00	84,00
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50,65	40,00	40,25	41,00	42,50	43,75	43,75
5	Rasio KDRT	%	0,112	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
6	LPM Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD (2021)
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
7	PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Swadaya Masyarakat terhadap Pembanguna Wilayah	%	-	-	1	1,1	1,2	1,3	1,3

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017 - 2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang tahun 2017, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2017 - 2021.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.